

DATA STRATEGIS KABUPATEN KOLAKA UTARA 2022





DATA STRATEGIS KABUPATEN KOLAKA UTARA 2022



kolutkab.bps.go.id

DATA STRATEGIS KABUPATEN KOLAKA UTARA 2022

ISSN	:	-
No. Publikasi	:	74080.2322
Katalog	:	1103003.7408
Ukuran Buku	:	17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	:	xiv + 119 hal
Naskah	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara
Penyunting	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara
Penyusun	:	Tino Aprilian, S.Tr.Stat.
Desain Kover	:	Tino Aprilian, S.Tr.Stat.
Ilustrasi Kover	:	Dokumentasi BPS Kabupaten Kolaka Utara
Infografis	:	Tino Aprilian, S.Tr.Stat.
Ilustrasi Infografis	:	www.freepik.com , www.pngtree.com
Diterbitkan oleh	:	©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.

KATA PENGANTAR

Data statistik merupakan bagian penting dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan serta menentukan strategi kebijakan pembangunan. Data strategis yang bersifat umum dan ringkas sangat dibutuhkan bagi para pemangku kebijakan dan pengguna data lain termasuk akademisi, peneliti, dan swasta. Oleh karena itu, sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses data, BPS Kabupaten Kolaka Utara melalui Publikasi Data Strategis Kabupaten Kolaka Utara 2022 menyajikan data-data strategis yang bersifat ringkas dan umum.

Data-data yang disajikan mencakup kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pertanian, pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan kemahalan konstruksi. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatannya, maka publikasi ini dilengkapi dengan penjelasan teknis berupa konsep dan definisi, metode penghitungan, serta cara menginterpretasikan data-data yang disajikan.

Kami menyadari bahwa publikasi ini mungkin belum mampu memenuhi semua harapan para pengguna data. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami butuhkan demi penyempurnaan penerbitan selanjutnya. Semoga data yang tersajikan dalam publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data untuk berbagai keperluan.

Lasusua, November 2023

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kolaka Utara**



Sidik, S.E., M.M.

<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

RINGKASAN DATA

RINGKASAN DATA STRATEGIS KABUPATEN KOLAKA UTARA 2018-2022

No. (1)	Indikator (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)
1	Jumlah Hari Hujan (Hari)	191	148	241	231	243
2	Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (Jiwa)	-	-	137.659	139.234	141.151
3	Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk (%)	-	-	1,22	1,53	1,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,53	1,38	2,13	3,18	2,86
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,06	79,61	82,23	79,76	77,18
6	Rasio Ketergantungan (%)	54,22	53,49	44,35	47,89	43,66
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,30	13,19	12,96	13,79	13,08
8	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	21,30	19,80	19,83	21,36	20,83
9	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	453.994	454.127	494.836	506.903	511.972
10	Gini Rasio (%)	0,33	0,32	0,35	0,36	0,38
11	Nilai Tukar Petani per Desember	94,93	92,58	97,28	101,08	99,52
12	Luas Panen Padi (Ha)	3.615,2	3.354,7	2.739,5	2.722,4	-
13	Produksi Padi (Ton)	13.951,06	13.801,24	11.687,8	-	-
14	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,94	70,15	70,36	70,36	70,40
15	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,67	7,86	8,12	8,22	8,54
16	Indeks Pembangunan Manusia	68,44	68,91	69,31	69,50	70,39
17	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,59	6,10	0,46	2,68	3,85
18	PDRB ADHB (Milyar Rp)	7.955,539	8.674,218	8.831,478	9.165,726	10.110,990
19	PDRB ADHK (Milyar Rp)	5.967,484	6.331,381	6.356,664	6.525,446	6.781,751
20	PDRB per Kapita (Juta Rp)	53,80	57,84	64,31	65,83	70,63
21	Indeks Kemahalan Konstruksi	103,97	99,33	97,79	94,64	90,81

<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Data Strategis	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xii
1. GEOGRAFI & IKLIM	1
2. KEPENDUDUKAN	7
Kepadatan Penduduk	10
Laju Pertumbuhan Penduduk	12
Rasio Jenis Kelamin	14
3. KETENAGAKERJAAN	19
Angkatan Kerja	21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	24
Tingkat Pengangguran Terbuka	26
Status Pekerjaan Utama	28
Rasio Ketergantungan	30
4. KEMISKINAN	33
Garis Kemiskinan	36
Persentase Penduduk Miskin	38
Indeks Kedalaman Kemiskinan	40
Indeks Keparahan Kemiskinan	42
Koefisien Gini (Gini Rasio)	44
5. PERTANIAN	47
Nilai Tukar Petani	49
Tanaman Pangan	53

DAFTAR ISI

Halaman

6.	PEMBANGUNAN MANUSIA	65
	Angka Harapan Hidup	67
	Rata-rata Lama Sekolah	70
	Harapan Lama Sekolah	73
	Rata-rata Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Daya Beli)	76
	Indeks Pembangunan Manusia	79
7.	PENDAPATAN REGIONAL	85
	Produk Domestik Regional Bruto	88
	Distribusi Persentase PDRB	95
	Laju Pertumbuhan PDRB	98
	Indeks Implisit	102
	PDRB per Kapita	104
	Inflasi	106
8.	KEMAHALAN KONSTRUKSI	109
	Daftar Pustaka	119

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2022	4
1.2	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meterologi Sangia Ni Bandera, 2022	5
2.1	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2022	13
2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Kolaka Utara, 2022.....	15
2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Kolaka Utara, 2022	16
3.1	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018 - 2022	23
3.2	Jumlah Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018 - 2022.....	23
3.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018 - 2022.....	25
3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018 - 2022	27
3.5	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022	29
3.6	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022	29
3.7	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022	31
4.1	Garis Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2022.....	37
4.2	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2022	39
4.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2022.....	41
4.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2022.....	43

DAFTAR TABEL

Halaman

4.5	Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2022.....	45
5.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2018=100).	51
5.2	Luas Panen Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	54
5.3	Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2020	55
5.4	Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	56
5.5	Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	57
5.6	Luas Panen Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	58
5.7	Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	59
5.8	Luas Panen Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	60
5.9	Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	61
5.10	Luas Panen Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	62
5.11	Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	63
6.1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten / Kota, 2018-2022	69
6.2	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten / Kota, 2018-2022.....	72
6.3	Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022	75
6.4	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022	78
6.5	Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM	80
6.6	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten / Kota, 2018-2022	82
7.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022.....	90
7.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kolaka Utara 2018-2022	91
7.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kolaka Utara 2018-2022	92

DAFTAR TABEL

Halaman

7.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2018-2022	93
7.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2018-2022	94
7.6	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2018-2022	96
7.7	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2018-2022	97
7.8	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022	99
7.9	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Persen) 2018-2022	100
7.10	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022	103
7.11	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Kolaka Utara, 2018 - 2022	105
7.12	IHK dan Tingkat Inflasi <i>Month to Month (mtm)</i> , <i>Year to Date (ytd)</i> , dan <i>Year on Year (yoy)</i> Gabungan 2 Kota Desember 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	107
8.1	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022	117

DAFTAR GRAFIK

Halaman

2.1	Piramida Penduduk Kabupaten Kolaka Utara, 2022	17
3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022.....	27
3.2	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022	31
4.1	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2022.....	39
4.2	Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2022.....	43
4.3	Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2022.....	45
5.1	Luas Panen Padi (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	54
5.2	Produksi Padi (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2020	55
5.3	Luas Panen Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017 - 2021	56
5.4	Produksi Jagung (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017 - 2021	57
5.5	Luas Panen Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021.....	58
5.6	Produksi Kacang Tanah (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021	59
5.7	Luas Panen Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017 - 2021	60
5.8	Produksi Ubi Kayu (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017 - 2021	61
5.9	Luas Panen Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017 - 2021	62
5.10	Produksi Ubi Jalar (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017 - 2021	63
6.1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022.....	71
6.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022.....	74

DAFTAR GRAFIK

Halaman

6.3	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Penduduk (Ribu Rupiah) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022.....	77
6.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022.....	83
7.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022.....	101
7.2	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022.....	105

<https://kolutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

1

GEOGRAFI & IKLIM

Kolaka Utara merupakan kabupaten yang secara **geografis** terletak di bagian ujung **barat laut Provinsi Sulawesi Tenggara**, berada di antara **2°46'45" - 3°50'50" LS**
120°41'16" - 121°26'31" BT

Luas Wilayah
Kolaka Utara
2.924,46 km²

Sumber: BPN Kolaka Utara

berbatasan dengan:

Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan

Teluk Bone

Kecamatan terkecil,
Watunohu
33,40 km²

Sumber: BPN Kolaka Utara

Kecamatan terluas,
Porehu
571,60 km²

Sumber: BPN Kolaka Utara

Kabupaten Konawe,
Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kabupaten Kolaka
Timur, Provinsi
Sulawesi Tenggara

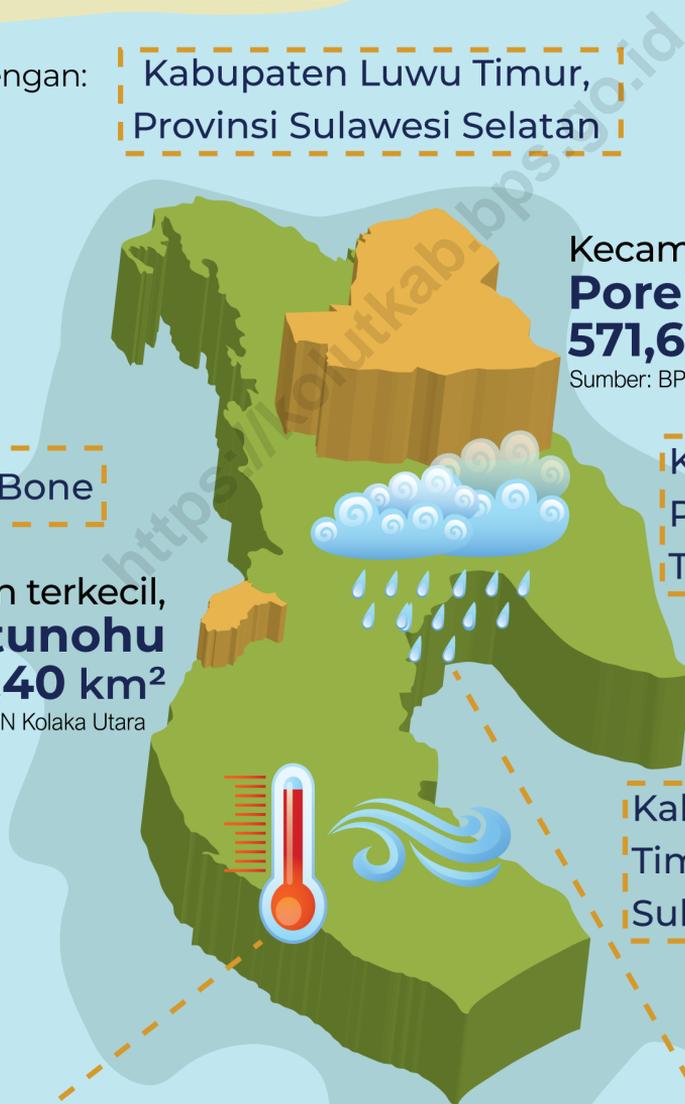
Rata-rata suhu udara
tahun 2022
29,35°C

Sumber: UPT BMKG Sangia Ni
Bandera Kolaka

Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi
Tenggara

Jumlah hari hujan
243 hari selama
tahun 2022

Sumber: UPT BMKG Sangia Ni
Bandera Kolaka



<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

GEOGRAFI & IKLIM

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Sejak tahun 2008, pendataan Podes mengalami perubahan dengan adanya penambahan kuesioner suplemen kecamatan dan kabupaten/kota. Penambahan kuesioner tersebut bertujuan untuk meningkatkan manfaat data Podes bagi para konsumen data dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Data Podes merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang muatannya beragam dan memberi gambaran tentang situasi pembangunan suatu wilayah (regional). Ini berbeda dengan data dari hasil pendekatan rumah tangga yang lebih menekankan pada dimensi aktivitas sektoral. Keduanya sama penting dan menjadi kekayaan BPS.

Cakupan Wilayah

Pencacahan Podes dilakukan secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Podes terakhir dilaksanakan pada tahun 2021 yang dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan. Petugas adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota, sementara narasumber adalah kepala desa/lurah atau narasumber lain yang memiliki pengetahuan terhadap wilayah target pencacahan.

GEOGRAFI & IKLIM

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas ¹ (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ranteangin	Ranteangin	83,35	2,85%	-
Lambai	Lambai	97,97	3,35%	-
Wawo	Wawo	260,96	8,92%	-
Lasusua	Lasusua	269,32	9,21%	-
Katoi	Katoi	144,49	4,94%	-
Kodeoha	Mala-Mala	137,26	4,69%	-
Tiwu	Tiwu	35,47	1,21%	-
Ngapa	Lapai	222,71	7,62%	-
Watunohu	Watunohu	33,40	1,14%	-
Pakue	Olo-Oloho	150,68	5,15%	-
Pakue Utara	Pakue	223,80	7,65%	-
Pakue Tengah	Latali	174,47	5,97%	-
Batu Putih	Batu Putih	236,56	8,09%	-
Porehu	Porehu	571,60	19,55%	-
Tolala	Tolala	282,42	9,66%	-
Kolaka Utara		2.924,46	100%	12*

Catatan : ¹Luas wilayah kecamatan dihitung berdasarkan citra satelit
* Data jumlah pulau di Kabupaten Kolaka Utara tidak tersedia menurut kecamatan

Sumber : ¹Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara
* Badan Informasi Geospasial Indonesia

GEOGRAFI & IKLIM

Tabel 1.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera, 2022

Bulan	Suhu (°C)			Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
	Minimum	Rata-rata	Maksimum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	24,00	30,20	35,00	101,50	15
Februari	24,00	29,50	34,00	299,30	18
Maret	24,20	29,60	34,20	352,90	22
April	24,00	29,30	34,40	306,90	19
Mei	23,60	29,50	34,00	215,10	18
Juni	23,00	28,60	33,60	201,70	24
Juli	23,40	28,50	34,60	128,00	24
Agustus	22,20	28,70	33,80	254,60	17
September	23,00	29,30	34,40	237,00	18
Oktober	23,80	29,60	34,60	306,00	22
November	22,80	29,70	34,40	149,00	23
Desember	24,00	29,70	34,20	171,80	23
Total					243

Sumber : Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera, Pomalaa-Kolaka

GEOGRAFI & IKLIM

"halaman kosong"

<https://kolutkab.bps.go.id>

2

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah semua orang yang **berdomisili** di wilayah geografis **Republik Indonesia** selama **6 bulan atau lebih** dan atau mereka yang berdomisili **kurang dari 6 bulan** tetapi **bertujuan untuk menetap**.



penduduk **paling padat**
tahun 2022 berada di
Kecamatan Watunohu
sebanyak **204 jiwa/km²**

laju pertumbuhan
penduduk Kolaka Utara
tahun 2010 - 2022

1,38 %

Rasio Jenis Kelamin

104

“terdapat 104 penduduk laki-laki
untuk setiap 100 penduduk
perempuan pada tahun 2022”



<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

KEPENDUDUKAN

Pendahuluan

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pencacahan penduduk menggunakan konsep *usual residence* yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya.

Adapun sumber data kependudukan lainnya adalah Survei Penduduk Antar Sensus dan registrasi penduduk. Survei Penduduk Antar Sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi. Sedangkan data populasi berdasarkan registrasi penduduk diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggunakan pendekatan *de jure*.

KEPENDUDUKAN

KEPADATAN PENDUDUK

Konsep dan Definisi

Kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis :

1. Kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyak nya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
2. Kepadatan fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (*cultivable land*).
3. Kepadatan agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *cultivable land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi dan tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandardisasi dengan luas wilayah.

Rumus

$$KP = \frac{P}{A}$$

- KP : Kepadatan Penduduk
P : Jumlah Penduduk
A : Luas Wilayah (km²)

Kegunaan

1. Untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah
2. Digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (program transmigrasi)

Interpretasi

Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Misalnya kepadatan penduduk Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 sebesar 48 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Kabupaten Kolaka Utara didiami oleh 48 penduduk.

KEPENDUDUKAN

Sumber Data

Sensus Penduduk 2010, Sensus Penduduk 2020.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Integrasi, Pengolahan, dan Diseminasi Statistik.

Keterbatasan

Dalam menginterpretasikan angka kepadatan penduduk harus sedikit berhati-hati karena angka ini merupakan rata-rata banyaknya penduduk per satuan luas di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk untuk daerah yang penduduknya menggerombol di suatu wilayah kurang dapat merepresentasikan kepadatan penduduk secara keseluruhan di wilayah tersebut. Contoh: kepadatan penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 134 jiwa/km² karena pada kenyataannya persebaran penduduk Indonesia tidak merata yakni berpusat di Pulau Jawa.

Catatan

Periode penyajian data angka kepadatan penduduk yaitu tahunan.

KEPENDUDUKAN

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Rumus

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah Penduduk tahun t

P_0 : Jumlah Penduduk tahun awal

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Kegunaan

Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

Interpretasi

- $r > 0$ berarti terjadi penambahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- $r = 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan tahun sebelumnya.
- $r < 0$ berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber Data

Sensus Penduduk 2020.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

KEPENDUDUKAN

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Integrasi, Pengolahan, dan Diseminasi Statistik.

Keterbatasan

Penghitungan laju pertumbuhan penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar penghitungan bunga majemuk.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ranteangin	6.077	73	4,31	1,26
Lambai	6.589	67	4,67	2,12
Wawo	7.052	27	5,00	2,26
Lasusua	28.418	106	20,13	2,69
Katoi	7.171	50	5,08	2,16
Kodeoha	11.365	83	8,05	0,47
Tiwu	4.652	131	3,30	1,29
Ngapa	17.341	78	12,29	0,07
Watunohu	6.804	204	4,82	0,76
Pakue	10.481	70	7,43	1,01
Pakue Tengah	7.773	37	5,85	1,63
Pakue Utara	8.264	45	5,51	2,36
Batu Putih	8.739	37	6,19	1,62
Porehu	6.733	12	4,77	0,14
Tolala	3.962	13	2,62	3,64
Kolaka Utara	141.151	48	100,00	1,38

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni)

KEPENDUDUKAN

RASIO JENIS KELAMIN

Konsep dan Definisi

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Rumus

$$SR = \frac{P_L}{P_W} \times 100$$

SR : Rasio jenis kelamin

P_L : Jumlah penduduk laki-laki

P_W : Jumlah penduduk perempuan

Kegunaan

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Interpretasi

- $SR > 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
- $SR = 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.
- $SR < 100$ berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sumber Data

Sensus Penduduk 2010, Sensus Penduduk 2020.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

KEPENDUDUKAN

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Integrasi, Pengolahan, dan Diseminasi Statistik.

Keterbatasan

Berdasarkan rumus di atas, penghitungan rasio jenis kelamin dilakukan secara total tanpa membedakan kelompok umur tertentu.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ranteangin	3.119	2.958	6.077	105,44
Lambai	3.368	3.221	6.589	104,56
Wawo	3.543	3.509	7.052	100,97
Lasusua	14.430	13.988	28.418	103,16
Katoi	3.687	3.484	7.171	105,83
Kodeoha	5.698	5.667	11.365	100,55
Tiwu	2.389	2.263	4.652	105,57
Ngapa	8.963	8.378	17.341	106,98
Watunohu	3.482	3.322	6.804	104,82
Pakue	5.391	5.090	10.481	105,91
Pakue Tengah	3.950	3.823	7.773	103,32
Pakue Utara	4.233	4.031	8.264	105,01
Batu Putih	4.447	4.292	8.739	103,61
Porehu	3.505	3.228	6.733	108,58
Tolala	1.884	1.808	3.692	104,20
Kolaka Utara	72.089	69.062	141.151	104,38

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni)

KEPENDUDUKAN

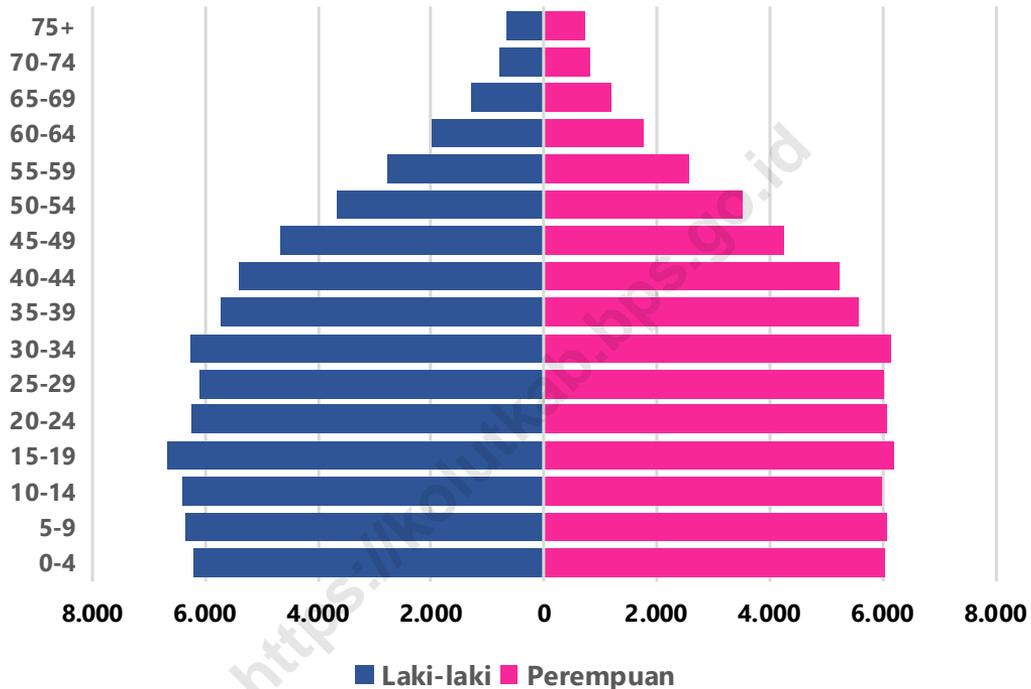
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Kolaka Utara, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	6.255	6.070	12.325
5-9	6.366	6.092	12.458
10-14	6.369	6.005	12.374
15-19	6.701	6.215	12.916
20-24	6.195	6.040	12.235
25-29	6.138	6.058	12.196
30-34	6.354	6.238	12.592
35-39	5.826	5.669	11.495
40-44	5.491	5.309	10.800
45-49	4.807	4.360	9.167
50-54	3.780	3.640	7.420
55-59	2.876	2.652	5.528
60-64	2.070	1.834	3.904
65-69	1.323	1.241	2.564
70-74	840	864	1.704
75+	698	775	1.473
Jumlah	72.089	69.062	141.151

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni)

KEPENDUDUKAN

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kolaka Utara, 2022



Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni)

Piramida penduduk Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 termasuk ke dalam tipe ekspansif. Karakteristik piramida ekspansif secara umum adalah:

- Sebagian besar penduduk berusia muda
- Penduduk lanjut usia relatif sedikit
- Angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian
- Pertumbuhan penduduk sangat cepat
- Membutuhkan banyak lapangan pekerjaan
- Rasio ketergantungan besar

Hal ini tercermin dari pola piramida di atas yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua meruncing. Dengan jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang terbanyak, yakni sebesar 12.916 jiwa.

KEPENDUDUKAN

"halaman kosong"

<https://kolutkab.bps.go.id>

3

KETENAGAKERJAAN

Bekerja adalah **kegiatan ekonomi** yang dilakukan oleh seseorang dengan **maksud** memperoleh atau membantu **memperoleh pendapatan** atau **keuntungan**, **paling sedikit 1 jam** secara terus menerus **dalam seminggu yang lalu**. Kegiatan tersebut **termasuk** pula kegiatan **pekerja tak dibayar** yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.



Jumlah Angkatan Kerja
di Kabupaten Kolaka Utara

89.511 orang

pada tahun 2022

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

TPAK 2022

77,18%



90,18 %



63,17 %

Rasio Ketergantungan
2022

43,66

artinya setiap **100 penduduk** yang **berusia produktif (15-64 tahun)** mempunyai **tanggungan sebanyak 43-44 orang** yang **belum produktif (<15 tahun)** dan dianggap **tidak produktif lagi (>64 tahun)**

Persentase

Pengangguran

terhadap angkatan
kerja 2022

2,86 %

BUTUH
PEKERJAAN



<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

KETENAGAKERJAAN

Pendahuluan

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Hal ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Tetapi sejak tahun 2015-2020, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Pada tahun 2020, Sakernas menyempurnakan konsep status pekerjaan yang diadopsi dari ICLS 20 serta penambahan pertanyaan untuk menangkap fenomena ekonomi digital. Besarnya sampel Sakernas Februari 2020 Semester I sebanyak 7.500 blok sensus (BS) atau 75.000 rumah tangga. Sementara pada Agustus 2020, besarnya sampel sebanyak 30.000 BS yang terdiri dari 7.500 BS sampel Sakernas Semester I dan 22.500 BS sampel Sakernas Tahunan.

ANGKATAN KERJA

Konsep dan Definisi

Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi) Sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang tidak bekerja karena sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan/atau melakukan aktivitas lainnya.

KETENAGAKERJAAN

Rumus

$$AK = a + b$$

AK : Angkatan Kerja

a : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja

b : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang pengangguran

Kegunaan

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Sumber Data

Survei Angkatan Kerja Nasional, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Sensus Penduduk.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Keterbatasan

Tidak bisa mencakup pekerja anak, karena batasannya penduduk usia bekerja adalah usia 15 tahun ke atas.

Catatan

Periode penyajian data angkatan kerja yaitu tahunan.

KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.1 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Angkatan Kerja						
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
2018	47.216	26.669	239	911	47.455	27.580	75.035
2019	48.814	32.599	238	905	49.052	33.504	82.556
2020	51.917	37.140	983	958	52.900	38.098	90.998
2021	51.662	35.408	1.472	1.392	53.134	36.800	89.934
2022	52.923	34.031	1.018	1.539	53.934	35.570	89.511

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Tabel 3.2 Jumlah Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Bukan Angkatan Kerja							Jumlah
	Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya			
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2018	2.045	2.671	884	17.252	2.034	1.397	4.963	21.320
2019	2.337	2.543	785	13.075	1.334	1.067	4.456	16.685
2020	1.581	2.888	942	12.171	1.422	661	3.945	15.720
2021	1.645	3.050	763	14.771	2.133	459	4.541	18.280
2022	2.658	2.683	1.160	15.991	1.914	2.064	5.273	20.738

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

KETENAGAKERJAAN

TINGKAT PARTISIPASI ANGGKATAN KERJA

Konsep dan Definisi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih). TPAK merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*) di suatu negara atau wilayah.

Rumus

$$\text{TPAK} = \frac{\text{AK}}{P_{15+}} \times 100\%$$

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

AK : Jumlah angkatan kerja

P_{15+} : Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)

Kegunaan

Mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Interpretasi

Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Contoh jika TPAK Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 adalah 77,18 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 77 sampai 78 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tahun 2022.

Sumber Data

Survei Angkatan Kerja Nasional.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

KETENAGAKERJAAN

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Tabel 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	90,53	56,40	74,06
2019	91,67	66,76	79,61
2020	93,06	70,79	82,23
2021	92,13	66,81	79,76
2022	90,18	63,17	77,18

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 sebesar 77,18 persen, angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 79,76 persen. Artinya, pada tahun 2022 penduduk usia kerja yang aktif terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif adalah sebesar 77,18 persen dari total penduduk usia kerja. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa TPAK penduduk laki-laki lebih besar dari TPAK penduduk perempuan, yang artinya lebih banyak penduduk laki-laki yang aktif terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif secara ekonomi dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk perempuan memiliki TPAK yang lebih rendah dikarenakan lebih banyak perempuan yang mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja atau mencari pekerjaan.

KETENAGAKERJAAN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Konsep dan Definisi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok menganggur, yaitu penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Rumus

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Kegunaan

Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

Interpretasi

Besarnya angka TPT mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Misal TPT Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 adalah 2,86 persen, artinya dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang angkatan kerja sebanyak 2-3 orang di antaranya merupakan pengangguran.

Sumber Data

Survei Angkatan Kerja Nasional.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

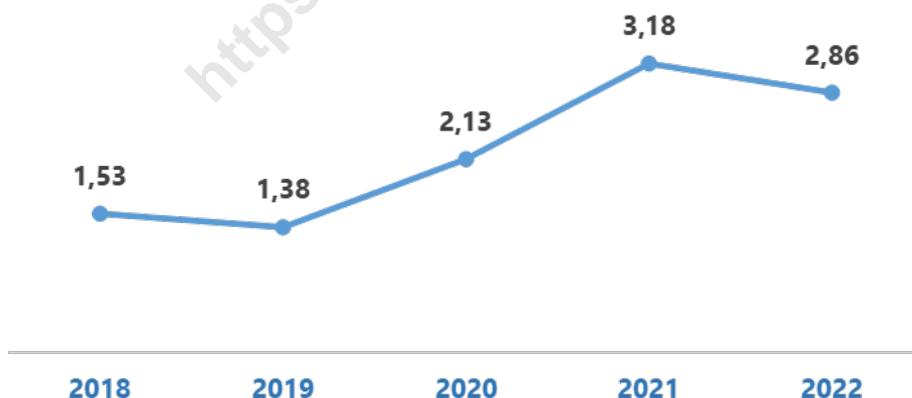
KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	0,50	1,86	1,53
2019	0,48	2,70	1,38
2020	1,86	2,51	2,13
2021	2,77	3,78	3,18
2022	1,89	4,33	2,86

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Grafik 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 sebesar 2,86 persen, angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,18 persen. Dalam periode 2018-2022, TPT Kabupaten Kolaka Utara cenderung mengalami tren kenaikan. Sebanyak 1,53 persen penduduk usia kerja menganggur pada tahun 2018 dan pada tahun 2022 menjadi 2,86 persen.

KETENAGAKERJAAN

STATUS PEKERJAAN UTAMA

Konsep dan Definisi

1. **Berusaha sendiri** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.
2. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/ pegawai tidak tetap.
3. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah kepala rumah tangga/ anggota rumah tangga berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
4. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan.
5. **Pekerja bebas** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
6. **Pekerja keluarga atau tidak dibayar** adalah anggota rumah tangga yang bekerja membantu kepala rumah tangga/anggota rumah tangga lain/orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Sumber Data

Survei Angkatan Kerja Nasional.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Status Pekerjaan Utama (1)	Jumlah				
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)
Berusaha sendiri	8.002	9.661	11.429	16.597	15.993
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	24.131	22.425	22.859	21.101	20.739
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.121	2.655	2.589	2.217	2.209
Buruh/karyawan/pegawai	13.411	15.549	16.112	17.536	23.008
Pekerja bebas pertanian	906	1.914	5.037	2.704	1.793
Pekerja bebas non pertanian	1.101	994	901		
Pekerja keluarga/tak dibayar	25.213	28.215	30.130	26.915	23.212
Jumlah	73.885	81.413	89.057	87.070	86.954

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Status Pekerjaan Utama (1)	Persentase (%)				
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)
Berusaha sendiri	10,83	11,87	12,83	19,06	18,39
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	32,66	27,54	25,67	24,23	23,85
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1,52	3,26	2,91	2,55	2,54
Buruh/karyawan/pegawai	18,15	19,10	18,09	20,14	26,46
Pekerja bebas pertanian	1,23	2,35	5,66	3,11	2,06
Pekerja bebas non pertanian	1,49	1,22	1,01		
Pekerja keluarga/tak dibayar	34,12	34,66	33,83	30,91	26,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

KETENAGAKERJAAN

RASIO KETERGANTUNGAN

Konsep dan Definisi

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif yaitu penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rumus

$$RK = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100\%$$

RK : Rasio Ketergantungan

P_{0-14} : Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)

P_{65+} : Jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas)

P_{14-64} : Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Kegunaan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk.

Interpretasi

Misalnya rasio ketergantungan tahun 2022 adalah sebesar 43,66 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43-44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Sumber Data

Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

KETENAGAKERJAAN

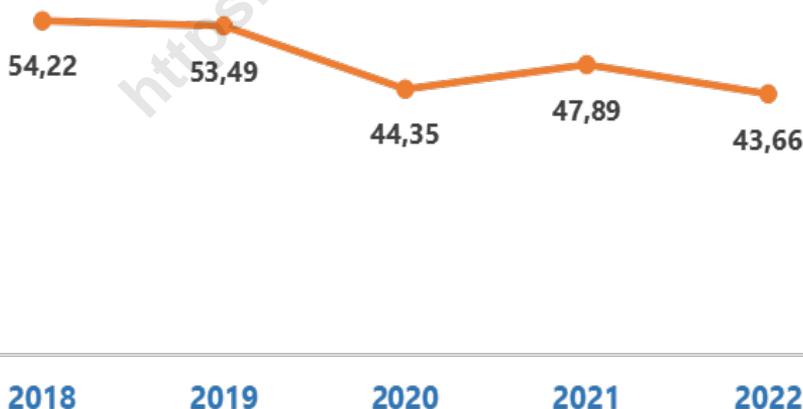
Penyedia Informasi
Fungsi Statistik Sosial.

Tabel 3.7 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun (1)	Rasio Ketergantungan (%) (2)
2018	54,22
2019	53,49
2020	44,35
2021	47,89
2022	43,66

Sumber : BPS, Sensus Penduduk dan SUPAS

Grafik 3.2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022



Sumber : BPS, Sensus Penduduk dan SUPAS

Rasio ketergantungan Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 adalah sebesar 43,66 persen, artinya setiap 100 penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 43 sampai 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dalam periode 2018-2022, rasio ketergantungan Kabupaten Kolaka Utara cenderung mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan menunjukkan angka 54,22 persen dan pada tahun 2022 menjadi 43,66 persen.

KETENAGAKERJAAN

"halaman kosong"

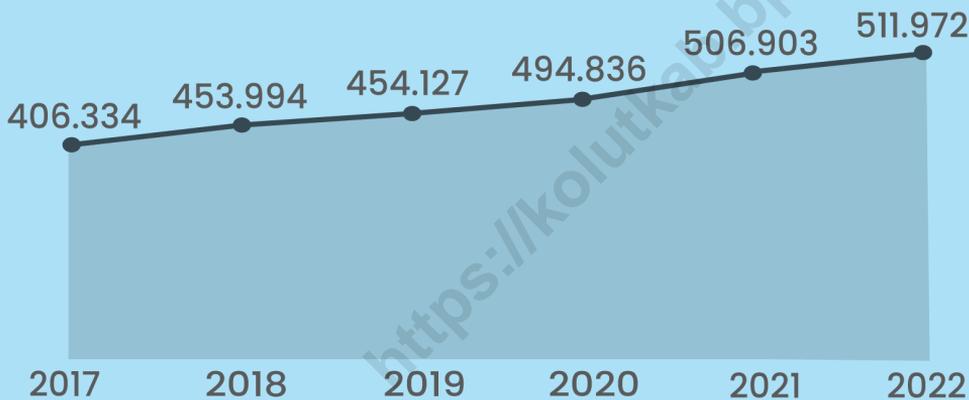
<https://kolutkab.bps.go.id>

4

KEMISKINAN

Berdasarkan konsep **basic need approach** yang digunakan BPS dalam mendefinisikan kemiskinan, **kemiskinan** dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga, **penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

GARIS KEMISKINAN KOLAKA UTARA (dalam rupiah)



Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok minuman serta non makanan.

Tingkat kemiskinan penduduk
Kolaka Utara Maret 2022

13,08[%]

setara dengan

20,63 ribu jiwa

Sejak tahun **2016**,
tingkat kemiskinan di
Kolaka Utara cenderung
mengalami **penurunan**

Sumber: BPS,
Survei Sosial Ekonomi
Nasional 2022



<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

KEMISKINAN

Pendahuluan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini digunakan juga di Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Sehingga definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK)/*poverty line*.

Garis kemiskinan (GK) adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) minimum makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penghitungan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Tahap pertama penghitungan GK adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas GK. GK periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (Indeks Harga Konsumen). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 jenis komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya harga implisit rata-rata kalori tersebut dikalikan dengan 2100. Nilai ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. Sedangkan GKNM adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (*headcount index* – P_0), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap* – P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* – P_2).

KEMISKINAN

GARIS KEMISKINAN

Konsep dan Definisi

Representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buahbuahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus

$$GK = GKM + GKNM$$

Kegunaan

Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (*headcount index* – P_0), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap* – P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* – P_2).

Interpretasi

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Misal, Garis Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 adalah sebesar Rp 511.972,00 artinya penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan sebesar Rp 511.972,00 ke bawah dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Konsumsi dan KOR.

KEMISKINAN

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Keterbatasan

Data kemiskinan yang dihasilkan dengan menggunakan GK adalah data kemiskinan makro. Data ini hanya dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu beserta karakteristiknya sehingga perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi, dan peningkatan kesempatan kerja, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program-program anti kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Untuk program-program anti kemiskinan yang sifatnya target sasaran (jaring-jaring pengaman sosial, seperti bansos, raskin, PKH, Jamkesmas, dll) data kemiskinan makro tidak dapat digunakan, karena hanya mampu menggambarkan.

Tabel 4.1 Garis Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun (1)	Garis Kemiskinan (Rupiah) (2)
2017	406.334
2018	453.994
2019	454.127
2020	494.836
2021	506.903
2022	511.972

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

KEMISKINAN

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P_0)

Konsep dan Definisi

Head Count Index ($HCI-P_0$) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). *Head Count Index* secara sederhana mengatur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin sehingga diperoleh persentase penduduk miskin.

Rumus

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

P_0 : Persentase penduduk miskin

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Kegunaan

Untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin.

Interpretasi

Angka yang ditunjukkan oleh P_0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tinggi pula.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

KEMISKINAN

Keterbatasan

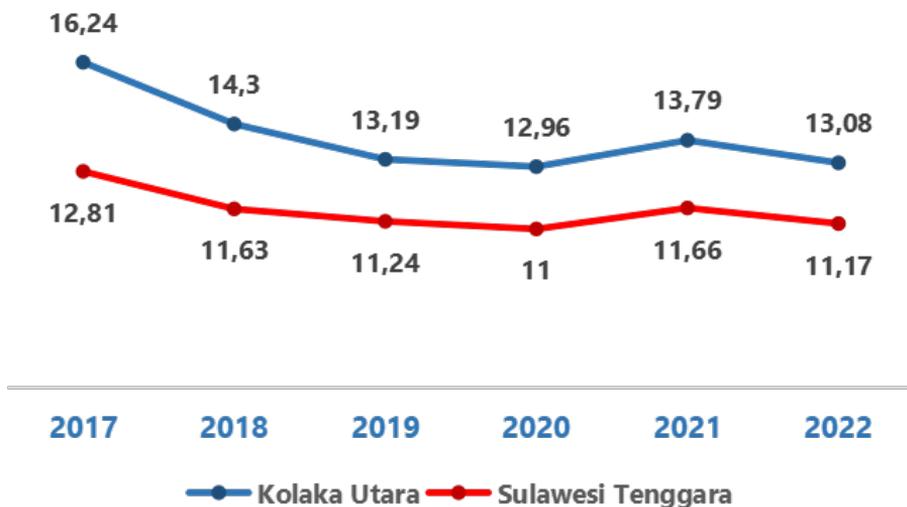
Hanya dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu beserta karakteristiknya.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
	(1)	(2)
2017	23,42	16,24
2018	21,30	14,30
2019	19,80	13,19
2020	19,83	12,96
2021	21,36	13,79
2022	20,63	13,08

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Grafik 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

KEMISKINAN

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P_1)

Konsep dan Definisi

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Rumus

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^1$$

P_1 : Indeks Kedalaman Kemiskinan

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Kegunaan

Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Interpretasi

Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sebaliknya jika semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Konsumsi dan KOR.

KEMISKINAN

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Keterbatasan

Tidak dapat memberikan gambaran yang meyakinkan mengenai perbedaan dalam keparahan kemiskinan di antara penduduk miskin.

Tabel 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	
	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
(1)	(2)	(3)
2017	2,73	1,87
2018	2,71	2,04
2019	3,20	2,23
2020	2,28	2,04
2021	2,52	2,16
2022	2,80	1,82

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada periode 2018-2022, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara mengalami tren berfluktuasi, dari 2,73 pada tahun 2017 menjadi 2,80 pada tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara juga menunjukkan tren serupa, dari 1,87 pada tahun 2018 menjadi 1,82 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

KEMISKINAN

INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P_2)

Konsep dan Definisi

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

P_2 : Indeks Keparahan Kemiskinan

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Kegunaan

Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinan (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Konsumsi dan KOR.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

KEMISKINAN

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Keterbatasan

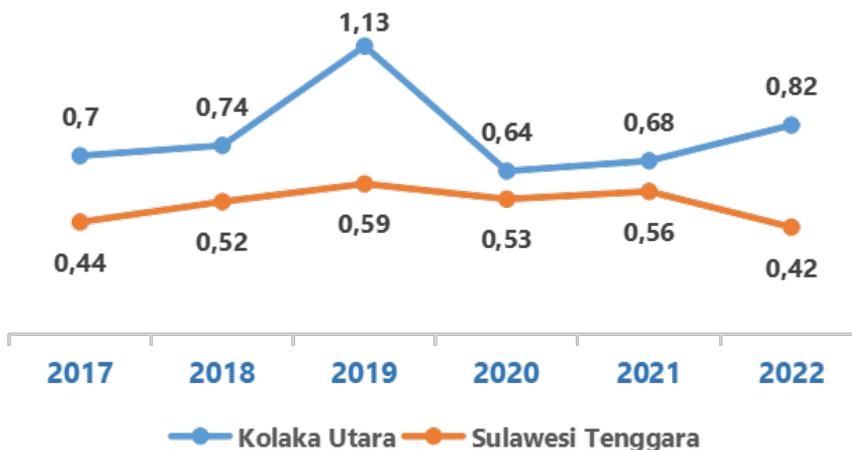
Sulit diinterpretasikan secara tersendiri dan tidak memiliki suatu makna jika disajikan secara tersendiri, sehingga sangat informatif apabila dibandingkan dengan *headcount index* dan *poverty gap index*.

Tabel 4.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan	
	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
(1)	(2)	(3)
2017	0,70	0,44
2018	0,74	0,52
2019	1,13	0,59
2020	0,64	0,53
2021	0,68	0,56
2022	0,82	0,42

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Grafik 4.2 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

KEMISKINAN

KOEFISIEN GINI (*GINI RATIO*)

Konsep dan Definisi

Koefisien gini (*gini ratio*) didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.

Rumus

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR : Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

f_{pi} : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

Kegunaan

Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Interpretasi

Nilai koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai koefisien gini antara 0-0,3 berarti ketimpangan rendah atau pemerataan sempurna, sedangkan jika antara 0,3-0,5 berarti ketimpangan sedang, sedangkan jika nilai koefisien gini antara 0,5-1 berarti ketimpangan tinggi atau sempurna. Perubahan *gini ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Jika nilai *gini ratio* mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Konsumsi dan KOR.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Data Strategis BPS.

KEMISKINAN

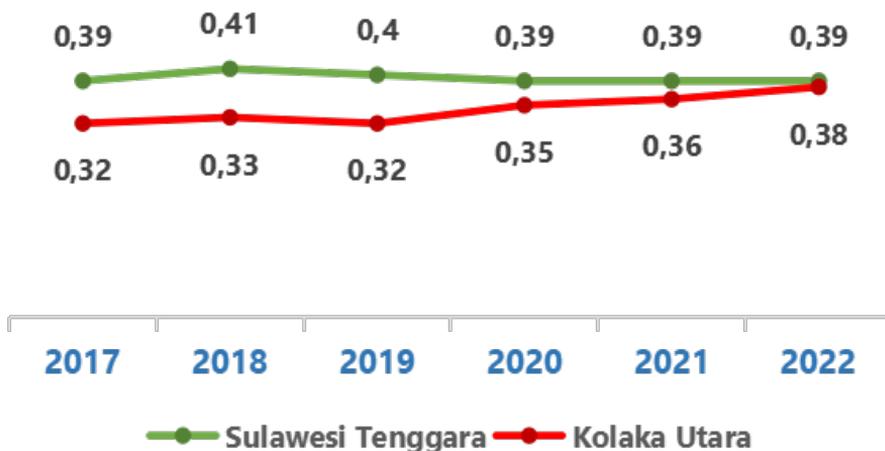
Penyedia Informasi
Fungsi Statistik Sosial.

Tabel 4.5 Koefisien Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022

Tahun	Koefisien Gini (<i>Gini Ratio</i>)	
	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
(1)	(2)	(3)
2017	0,32	0,39
2018	0,33	0,41
2019	0,32	0,40
2020	0,35	0,39
2021	0,36	0,39
2022	0,38	0,39

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Grafik 4.3 Koefisien Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 nilai koefisien gini Kabupaten Kolaka Utara maupun Provinsi Sulawesi Tenggara stagnan di kisaran 0,3-0,4 yang berarti termasuk dalam ketimpangan sedang.

KEMISKINAN

"halaman kosong"

<https://kolutkab.bps.go.id>

5

PERTANIAN

Produksi Tanaman Pangan 2021^{XX}

※Angka Tetap (ATAP) 2021

Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Penyajian data produksi tanaman pangan tahun tertentu dilakukan sebanyak lima kali dengan status angka yang berbeda, yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP).

Padi

Luas lahan panen

2.722^{ha}

Produksi*

11.688^{ton}

*ATAP 2020



Jagung

Luas lahan panen

4.904^{ha}

Produksi

25.665^{ton}



Kacang Kedelai

Luas lahan panen

20^{ha}

Produksi

29^{ton}



Kacang Tanah

Luas lahan panen

7^{ha}

Produksi

7,41^{ton}



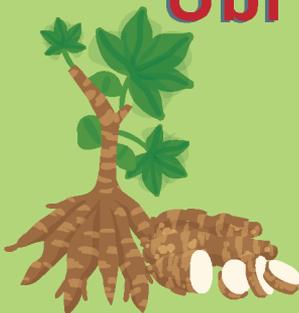
Ubi Kayu

Luas lahan panen

19^{ha}

Produksi

499^{ton}



Ubi Jalar

Luas lahan panen

14^{ha}

Produksi

158^{ton}



<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

PERTANIAN

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Rumus

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

NTP : Nilai Tukar Petani, menggunakan tahun dasar 2018

I_t : Indeks harga yang diterima petani

I_b : Indeks harga yang dibayar petani

Kegunaan

- Untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.
- Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Selain itu menunjukkan tingkat daya saing (*competiveness*) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Interpretasi

- a. $NTP > 100$: berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- b. $NTP = 100$: berarti petani mengalami impas/*break even*. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- c. $NTP < 100$: berarti petani mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

PERTANIAN

Sumber Data

Selain dari Survei Harga Produsen Perdesaan (HPD) dan Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD), variabel penyusun indikator ini dilengkapi dari Survei Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SDT NTP), Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, Susenas Modul Konsumsi, dan Survei Biaya Hidup (SBH).

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Data Strategis BPS.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Distribusi.

Nilai Tukar Petani 2022

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada kabupaten-kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara pada Desember 2022, NTP mengalami kenaikan sebesar 0,002 persen dibandingkan NTP November 2022, yaitu dari 99,514 menjadi 99,515. Kenaikan NTP pada Desember 2022 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal yang mengalami kenaikan.

Kenaikan NTP Desember 2022 dipengaruhi oleh naiknya NTP di tiga subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,60 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 0,91 persen, dan subsektor peternakan sebesar 0,34 persen. Sementara itu, NTP pada dua subsektor lainnya mengalami penurunan yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,51 persen dan subsektor perikanan sebesar 0,25 persen.

PERTANIAN

Tabel 5.1 Nilai Tukar Petani Per Subsektor Serta Persentase Perubahannya (2018=100)

Subsektor	November 2022	Desember 2022	% Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	99,514	99,515	0,002
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	112,766	113,064	0,265
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	113,317	113,615	0,263
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,60	112,90	0,27
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	116,32	116,56	0,20
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	94,37	94,94	0,60
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	107,11	108,00	0,84
- Padi	101,04	102,22	1,17
- Palawija	130,13	129,95	-0,14
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	113,50	113,76	0,23
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,83	113,00	0,15
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	115,10	115,58	0,41
2. Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	110,74	111,75	0,91
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	124,45	125,84	1,12
- Sayur-sayuran	134,19	138,54	3,24
- Buah-buahan	117,75	117,08	-0,57
- Tanaman Obat	118,15	118,15	0,00
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	112,38	112,61	0,20
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,33	112,56	0,21
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	113,40	113,56	0,14
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	97,47	96,97	-0,51
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	110,35	110,16	-0,17
- Tanaman Perkebunan Rakyat	110,35	110,16	-0,17
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	113,21	113,60	0,34
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,73	113,14	0,36

PERTANIAN

Subsektor	November 2022	Desember 2022	% Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	117,43	117,65	0,19
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	108,46	108,83	0,34
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	123,40	123,97	0,46
- Ternak Besar	130,53	130,58	0,04
- Ternak Kecil	123,94	124,54	0,48
- Unggas	107,25	109,22	1,84
- Hasil Ternak	113,86	114,55	0,61
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	113,78	113,91	0,12
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,27	112,50	0,21
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	117,13	117,05	-0,07
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	104,38	104,11	-0,25
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)	118,30	118,24	-0,04
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	113,34	113,57	0,21
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,98	112,32	0,30
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	115,42	115,53	0,10
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,57	101,04	-0,51
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan (It)	115,27	114,89	-0,32
- Penangkapan Perairan Umum	103,99	103,99	0,00
- Penangkapan Laut	115,51	115,13	-0,33
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	113,49	113,71	0,19
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,94	112,30	0,32
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	115,68	115,70	0,01
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	114,79	115,48	0,60
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It)	129,45	130,59	0,88
- Budidaya Air Tawar	100,00	100,00	0,00
- Budidaya Laut	130,57	133,57	2,30
- Budidaya Air Payau	128,79	128,29	-0,39
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)	112,77	113,09	0,28
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,15	112,40	0,23
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	114,45	114,92	0,41

PERTANIAN

TANAMAN PANGAN

Konsep dan Definisi

- Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, lahan Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija. Berdasarkan pengairannya lahan sawah dibedakan menjadi lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan sawah rawa pasang surut, dan lahan sawah rawa lebak.
- Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya. Lahan yang berstatus lahan sawah yang tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi dimasukkan dalam lahan bukan sawah.
- Luas panen berhasil (luas panen) adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11 persen dari keadaan normal yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam.
- Padi, berdasarkan cara penanamannya terdiri dari padi sawah (yang ditanam di sawah) dan padi ladang (yang ditanam di lahan bukan sawah).
- Palawija, terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu/singkong, dan ubi jalar.
- Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Penyajian data produksi tanaman pangan tahun tertentu dilakukan sebanyak lima kali dengan status angka yang berbeda, yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP).
- Produktivitas adalah penghitungan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi pada periode satu tahun laporan.

Sumber Data

Survei Pertanian Tanaman Pangan, Survei Ubinan.

Publikasi

Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Kolaka Utara.

PERTANIAN

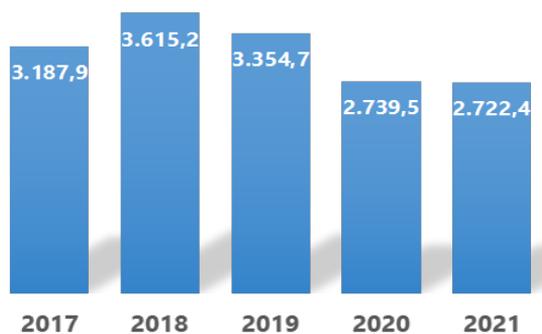
Tabel 5.2 Luas Panen Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	757,6	583,7	649,5	583,7	504,9
Lambai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wawo	276,7	283,4	241,6	256,1	283,4
Lasusua	73,8	108,6	108,4	106,5	66,1
Katoi	61,2	68,1	0,0	0,0	0,0
Kodeoha	147,3	112,4	123,3	83,1	156,8
Tiwu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ngapa	0,0	0,0	0,0	109,0	169,8
Watunohu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pakue	78,4	73,7	36,7	0,0	0,0
Pakue Utara	491,2	521,4	457,0	439,7	477,0
Pakue Tengah	180,4	631,0	669,0	350,5	230,4
Batu Putih	1.043,9	1.100,6	998,6	741,5	821,8
Porehu	77,4	132,3	70,6	69,4	12,2
Tolala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kolaka Utara	3.187,9	3.615,2	3.354,7	2.739,5	2.722,4

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.1 Luas Panen Padi (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

Tabel 5.3 Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2020

Kecamatan (1)	Produksi (Ton) Per Tahun			
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
Ranteangin	3.359,20	2.252,50	2.672,04	2.490,3
Lambai	0,0	0,0	0,0	0,0
Wawo	1.226,89	1.093,64	993,94	1.092,6
Lasusua	327,23	419,09	445,96	454,4
Katoi	271,36	262,80	0,0	0,0
Kodeoha	653,13	433,75	507,26	354,5
Tiwu	0,0	0,0	0,0	0,0
Ngapa	0,0	0,0	0,0	465,0
Watunohu	0,0	0,0	0,0	0,0
Pakue	347,63	284,41	150,98	0,0
Pakue Utara	2.177,98	2.012,08	1.880,10	1.875,9
Pakue Tengah	799,89	2.435,03	2.752,27	1.495,4
Batu Putih	4.628,65	4.247,22	4.108,24	3.163,5
Porehu	343,19	510,55	290,45	296,1
Tolala	0,0	0,0	0,0	0,0
Kolaka Utara	14.135,15	13.951,06	13.801,24	11.687,8

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2021-2022 belum tersedia

Grafik 5.2 Produksi Padi (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2020



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

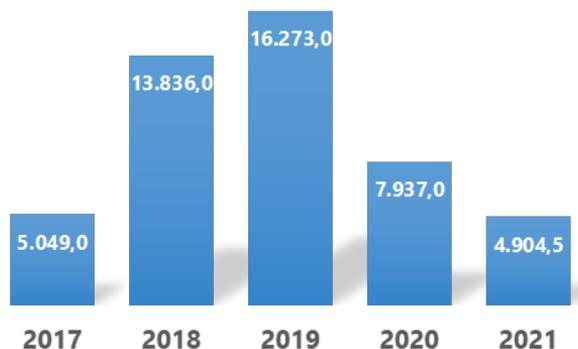
Tabel 5.4 Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	165	692	494	228	95,0
Lambai	93	713	97	80	66,0
Wawo	0	607	112	31	28,0
Lasusua	495	930	1.099	447	354,0
Katoi	245	251	201	77	72,0
Kodeoha	306	1.553	1.188	765	293,0
Tiwu	111	516	546	295	247,0
Ngapa	1.097	1.824	1.270	767	838,5
Watunohu	260	1.061	1.315	808	425,0
Pakue	259	1.845	2.456	1236	919,0
Pakue Utara	678	449	2.086	938	440,0
Pakue Tengah	459	1.514	1.939	675	374,0
Batu Putih	469	1.046	1.921	929	425,0
Porehu	253	639	1.365	590	313,0
Tolala	159	196	184	71	15,0
Kolaka Utara	5.049	13.836	16.273	7.937	4.904,5

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.3 Luas Panen Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

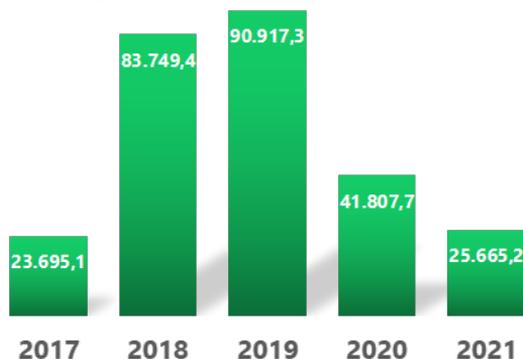
Tabel 5.5 Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Produksi (Ton) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	774,4	4.188,7	2.760,0	1.201,0	497,1
Lambai	436,5	4.315,8	541,9	421,4	345,4
Wawo	0,0	3.674,2	625,7	163,3	146,5
Lasusua	2.323,0	5.629,3	6.140,1	2.354,5	1.852,5
Katoi	1.149,8	1.519,3	1.123,0	405,6	376,8
Kodeoha	1.436,1	9.400,3	6.637,4	4.029,6	1.533,3
Tiwu	520,9	3.123,4	3.050,5	1.553,9	1.292,6
Ngapa	5.148,2	11.040,7	7.095,5	4.040,1	4.387,9
Watunohu	1.220,2	6.422,2	7.346,9	4.256,1	2.224,0
Pakue	1.215,5	11.167,8	13.721,7	6.510,6	4.809,1
Pakue Utara	3.181,9	2.717,8	11.654,5	4.940,9	2.302,5
Pakue Tengah	2.154,1	9.164,2	10.833,2	3.555,5	1.957,1
Batu Putih	2.201,0	6.331,4	10.732,6	4.893,5	2.224,0
Porehu	1.187,3	3.867,9	7.626,3	3.107,8	1.637,9
Tolala	746,2	1.186,4	1.028,0	374,0	78,5
Kolaka Utara	23.695,1	83.749,4	90.917,3	41.807,7	25.665,2

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.4 Produksi Jagung (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

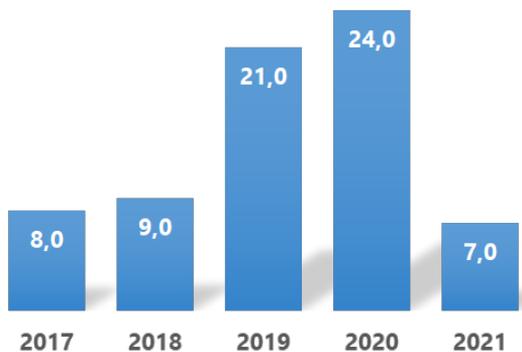
Tabel 5.6 Luas Panen Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lambai	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0
Wawo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lasusua	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Katoi	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Kodeoha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiwu	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Ngapa	4,5	7,0	8,0	5,0	0,0
Watunohu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pakue	0,0	0,0	11,0	16,00	4,0
Pakue Utara	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Pakue Tengah	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Batu Putih	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0
Porehu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kolaka Utara	8,0	9,0	21,0	24,0	7,0

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.5 Luas Panen Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

Tabel 5.7 Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Produksi (Ton) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lambai	0,00	1,47	1,48	0,00	2,12
Wawo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lasusua	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Katoi	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00
Kodeoha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiwu	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00
Ngapa	8,43	10,30	11,84	5,50	0,00
Watunohu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakue	0,00	0,00	16,28	17,59	4,23
Pakue Utara	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
Pakue Tengah	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Batu Putih	0,00	0,00	0,00	2,20	1,06
Porehu	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Tolala	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kolaka Utara	14,98	13,25	31,08	26,39	7,41

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.6 Produksi Kacang Tanah (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

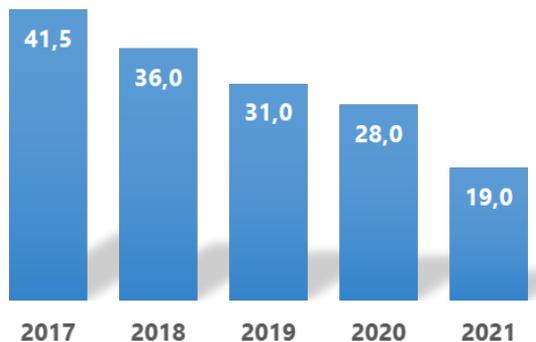
Tabel 5.8 Luas Panen Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lambai	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Wawo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lasusua	3,5	1,0	2,0	2,0	2,0
Katoi	3,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Kodeoha	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Tiwu	3,5	1,0	1,0	0,0	0,0
Ngapa	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Watunohu	1,5	9,0	8,0	0,0	0,0
Pakue	9,0	7,0	9,0	23,0	11,0
Pakue Utara	8,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Pakue Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Batu Putih	5,0	1,0	3,0	0,0	6,0
Porehu	4,0	5,0	2,0	1,0	0,0
Tolala	2,0	3,0	0,0	1,0	0,0
Kolaka Utara	41,5	36,0	31,0	28,0	19,0

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.7 Luas Panen Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

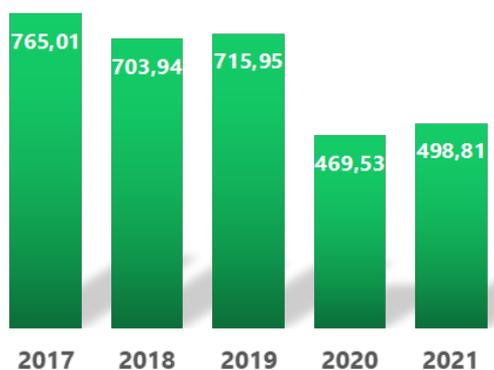
Tabel 5.9 Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Produksi (Ton) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lambai	0,00	19,55	23,10	16,77	0,00
Wawo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lasusua	64,52	19,55	46,19	33,54	52,51
Katoi	55,30	78,22	92,38	0,00	0,00
Kodeoha	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
Tiwu	64,52	19,55	23,10	0,00	0,00
Ngapa	36,87	39,11	0,00	0,00	0,00
Watunohu	27,65	175,99	184,76	0,00	0,00
Pakue	165,91	136,88	207,86	385,69	288,78
Pakue Utara	147,47	39,11	0,00	0,00	0,00
Pakue Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Batu Putih	92,17	19,55	69,29	0,00	157,52
Porehu	73,74	97,77	46,19	16,77	0,00
Tolala	36,87	58,66	0,00	16,77	0,00
Kolaka Utara	765,01	703,94	715,95	469,53	498,81

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.8 Produksi Ubi Kayu (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

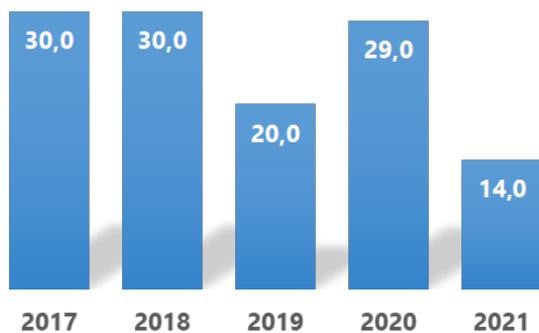
Tabel 5.10 Luas Panen Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lambai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wawo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lasusua	6,5	5,0	4,0	3,0	2,0
Katoi	1,0	4,0	1,0	0,0	0,0
Kodeoha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiwu	3,5	2,0	1,0	0,0	0,0
Ngapa	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Watunohu	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Pakue	9,0	6,0	9,0	25,0	12,0
Pakue Utara	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Pakue Tengah	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Batu Putih	1,0	4,0	2,0	0,0	0,0
Porehu	4,0	3,0	0,0	1,0	0,0
Tolala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kolaka Utara	30,0	30,0	20,0	29,0	14,0

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.9 Luas Panen Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

Tabel 5.11 Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021

Kecamatan (1)	Produksi (Ton) Per Tahun				
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Ranteangin	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Lambai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wawo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lasusua	105,73	88,12	70,70	41,58	22,52
Katoi	16,27	70,49	17,67	0,00	0,00
Kodeoha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiwu	56,93	35,25	17,67	0,00	0,00
Ngapa	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Watunohu	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00
Pakue	146,39	105,74	159,07	346,48	135,11
Pakue Utara	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00
Pakue Tengah	32,53	17,62	0,00	0,00	0,00
Batu Putih	16,27	70,49	35,35	0,00	0,00
Porehu	65,06	52,87	0,00	13,86	0,00
Tolala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolaka Utara	487,98	528,69	353,48	401,92	157,63

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

*Data 2022 belum tersedia

Grafik 5.10 Produksi Ubi Jalar (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2017-2021



Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

PERTANIAN

<https://kolutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

6

PEMBANGUNAN MANUSIA

Status Pembangunan Manusia di Kolaka Utara **Tergolong Tinggi**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Kabupaten Kolaka Utara, IPM merupakan **data strategis** karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai indikator penentuan **Dana Alokasi Umum (DAU)**.



IPM Kolaka Utara

Naik 0,89 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Selama periode 2010-2022 **IPM Kolaka Utara** terus mengalami peningkatan

70,39
2022

Kolaka Utara menempati **peringkat ke-7** dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara

Komponen **Penyusun IPM** Kabupaten Kolaka Utara **2022**

Sumber: BPS, Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional



Angka Harapan Hidup
(AHH)

70,40 tahun



Pengeluaran per Kapita yang
Disesuaikan (**Rupiah**)

10,721 juta



Rata-rata Lama Sekolah
(RLS)

8,54 tahun



Harapan Lama Sekolah
(HLS)

12,16 tahun

<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendahuluan

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan/pendidikan; dan standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

ANGKA HARAPAN HIDUP (e_0)

Konsep dan Definisi

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Penghitungan AHH secara tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan dua data dasar yakni rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live birth*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) untuk setiap wanita berusia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan AHH dilakukan dengan perangkat lunak *Mortpak Life* dengan metode *Trussel* dan model *West*.

Rumus

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Kegunaan

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Interpretasi

Sebagai contoh, Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk Tahun 1971 adalah 47,7 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terlahir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Utara.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Keterbatasan

Karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka angka kematian menurut umur sulit didapatkan, sehingga untuk menghitung Angka Harapan Hidup tidak dapat dihitung secara langsung melalui Tabel Kematian. Oleh sebab itu, digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 6.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Kendari	73,26	73,52	73,77	73,83	73,93
2	Kolaka Timur	71,99	72,33	72,67	72,82	72,90
3	Kota Baubau	70,72	70,95	71,19	71,25	71,36
4	Kolaka	70,38	70,72	71,06	71,21	71,30
5	Buton Utara	70,56	70,75	70,93	70,93	70,96
6	Konawe Selatan	70,24	70,52	70,80	70,87	70,95
7	Wakatobi	69,85	70,13	70,41	70,48	70,59
8	Muna	69,97	70,18	70,39	70,41	70,47
9	Kolaka Utara	69,94	70,15	70,36	70,36	70,40
10	Muna Barat	69,97	70,16	70,34	70,35	70,39
11	Konawe	69,76	70,02	70,27	70,32	70,38
12	Konawe Utara	68,95	69,23	69,51	69,53	69,59
13	Bombana	68,17	68,54	68,91	69,09	69,20
14	Konawe Kepulauan	68,06	68,25	68,43	68,43	68,46
15	Buton	67,60	67,92	68,25	68,39	68,46
16	Buton Tengah	67,33	67,50	67,66	67,69	67,78
17	Buton Selatan	67,33	67,50	67,66	67,69	67,76
	Sulawesi Tenggara	70,72	70,97	71,22	71,27	71,37

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 menempati urutan ke-9 dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada periode 2018-2022 AHH Kabupaten Kolaka Utara cenderung mengalami kenaikan dari 69,94 tahun pada tahun 2018 menjadi 70,40 tahun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.

PEMBANGUNAN MANUSIA

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Konsep dan Definisi

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi variabel pendidikan seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun

Rumus

$$RLS = \frac{1}{P_{25+}} \sum_{i=1}^{P_{25+}} s_i$$

P_{25+} : Jumlah penduduk usia 25 ke atas

s_i : Lama sekolah penduduk ke- i ($i=1,2,3,\dots,P_{25+}$), yang mana:

- Tidak pernah bersekolah = 0
- Masih sekolah jenjang SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- Masih sekolah jenjang S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir + kelas terakhir - 1

Adapun Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan adalah:

SD	: 6 tahun	Akademi/Diploma III	: 15 tahun
SMP	: 9 tahun	Sarjana/Diploma IV	: 16 tahun
SMA	: 12 tahun	Pasca Sarjana	: 18 tahun
Diploma I	: 13 tahun	Doktor	: 21 tahun
Diploma II	: 14 tahun		

Kegunaan

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal.

Interpretasi

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Sumber Data

Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Utara.

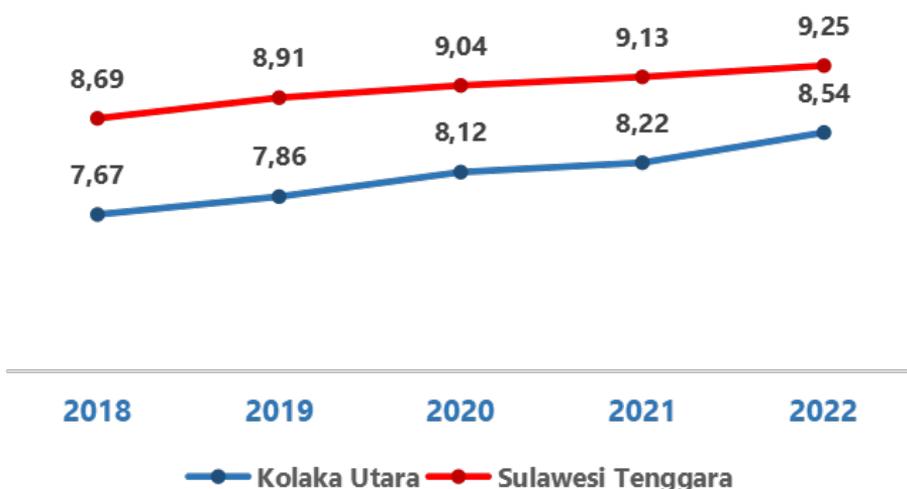
Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Keterbatasan

Harus disamakan di setiap negara/wilayah. Selain itu, indikator ini tidak secara langsung memperhitungkan efek pengulangan, yang mungkin tidak ketat antar satu wilayah dengan lainnya bila dibandingkan.

Grafik 6.1 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018 -2022



Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 6.2 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Kendari	11,69	11,94	12,20	12,51	12,52
2	Kota Baubau	10,13	10,37	10,64	10,91	10,92
3	Konawe Utara	8,81	8,97	9,21	9,30	9,53
4	Konawe Kepulauan	9,17	9,18	9,41	9,42	9,43
5	Konawe	8,94	9,14	9,15	9,21	9,30
6	Buton Utara	8,54	8,75	8,92	8,93	9,11
7	Kolaka	8,57	8,76	8,98	8,99	9,06
8	Kolaka Utara	7,67	7,86	8,12	8,22	8,54
9	Muna	8,19	8,35	8,36	8,46	8,52
10	Wakatobi	7,72	7,73	7,94	8,16	8,50
11	Konawe Selatan	7,73	7,74	7,86	8,11	8,27
12	Buton	7,50	7,51	7,71	7,92	8,25
13	Kolaka Timur	7,18	7,35	7,56	7,84	8,15
14	Bombana	7,54	7,74	8,03	8,04	8,05
15	Buton Selatan	6,01	7,32	7,53	7,54	7,64
16	Muna Barat	6,76	6,77	7,01	7,30	7,60
17	Buton Tengah	7,28	7,29	7,30	7,31	7,33
	Sulawesi Tenggara	8,69	8,91	9,04	9,13	9,25

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 menempati urutan ke-8 dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada periode 2018-2022 RLS Kabupaten Kolaka Utara terus mengalami kenaikan dari 7,67 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,54 tahun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara.

PEMBANGUNAN MANUSIA

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Konsep dan Definisi

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Rumus

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

- t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
 E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
 P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t; i : usia (a, a+1, ..., n)
FK : Faktor koreksi pesantren

$$FK = \frac{SM}{P_{7+}} + 1$$

$$SM = r_s \times s$$

$$r_s = \frac{m}{S}$$

- SM : Jumlah santri sekolah dan mukim
 P_{7+} : Jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas
 r_m : Rasio santri mukim
s : Jumlah santri sekolah
m : Jumlah santri bermukim
S : Jumlah santri seluruhnya

PEMBANGUNAN MANUSIA

Kegunaan

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Interpretasi

Tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Semakin tinggi angka HLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang diharapkan akan ditamatkannya.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Direktorat Pendidikan Islam Kemenag.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

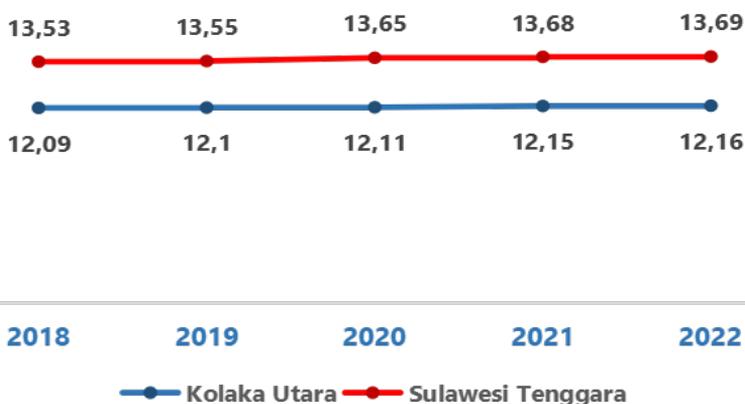
Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Utara.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Grafik 6.2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 6.3 Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Kendari	16,20	16,28	16,62	16,89	16,90
2	Kota Baubau	14,80	14,81	15,16	15,17	15,18
3	Muna	13,77	13,78	13,79	13,80	14,01
4	Buton	13,53	13,74	13,75	13,76	13,87
5	Wakatobi	13,15	13,20	13,50	13,51	13,51
6	Buton Selatan	12,56	12,94	13,23	13,24	13,25
7	Buton Tengah	12,35	12,70	13,00	13,12	13,18
8	Konawe Utara	12,33	12,54	12,83	13,08	13,11
9	Konawe	12,98	12,99	13,00	13,01	13,03
10	Kolaka	12,39	12,80	12,81	12,83	13,02
11	Buton Utara	12,74	12,75	12,76	12,92	12,99
12	Kolaka Timur	11,89	12,15	12,41	12,69	12,69
13	Muna Barat	12,13	12,20	12,50	12,51	12,61
14	Konawe Selatan	12,23	12,24	12,36	12,37	12,59
15	Konawe Kepulauan	11,59	11,81	12,06	12,32	12,53
16	Kolaka Utara	12,09	12,10	12,11	12,15	12,16
17	Bombana	11,82	11,83	11,84	11,85	11,89
	Sulawesi Tenggara	13,53	13,55	13,65	13,68	13,69

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 menempati urutan ke-16 dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada periode 2018-2022, RLS Kabupaten Kolaka Utara terus mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dari 12,09 tahun pada tahun 2018 menjadi 12,16 tahun pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan jenjang pendidikan yang diharapkan dapat ditamatkan oleh penduduk usia sekolah di Kabupaten Kolaka Utara terus meningkat.

PEMBANGUNAN MANUSIA

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA YANG DISESUAIKAN (DAYA BELI)

Konsep dan Definisi

Rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcasing power parity*) merupakan ukuran yang digunakan oleh BPS untuk menghitung standar hidup layak berbasis formula Rao. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Rumus

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Penghitungan PPP dilakukan dengan rumus:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

- ppp_j : paritas daya beli di wilayah j
p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
p_{ik} : harga komoditas i di Kota Jakarta Selatan
m : jumlah komoditas

Kegunaan

Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Interpretasi

Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Utara.

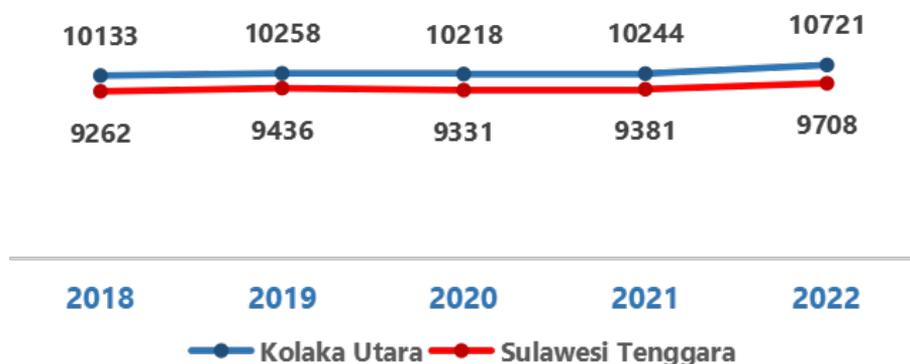
Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Sosial.

Keterbatasan

Idealnya untuk mengukur daya beli, pendekatan yang terbaik adalah dengan mengukur tingkat pendapatan (income) dengan disposable income. Namun, permasalahannya sulit sekali untuk mengukur pendapatan seseorang karena setiap orang tidak hanya mendapatkan pendapatan dari gaji pokok mereka tetapi mereka juga kerap mendapat tambahan-tambahan dari sumber-sumber penghasilan yang lain. Nilai pengeluaran perkapita tidak dapat digunakan untuk keterbandingan antar wilayah mana yang daya belinya lebih baik. Selain itu 96 komoditi yang digunakan untuk mengukur daya beli tidak mencerminkan kondisi spesifik lokal dimana komoditas tiap daerah mungkin berbeda.

Grafik 6.3 Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Penduduk (Ribu Rupiah) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 6.4 Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (000 Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Kendari	14.168	14.392	14.335	14.356	14.765
2	Kolaka	12.384	12.525	12.515	12.525	12.639
3	Kota Baubau	10.374	10.523	10.483	10.503	10.835
4	Kolaka Utara	10.133	10.258	10.218	10.244	10.721
5	Konawe	10.004	10.200	10.126	10.151	10.552
6	Wakatobi	9.136	9.388	9.204	9.280	9.758
7	Konawe Utara	9.050	9.215	9.165	9.181	9.666
8	Konawe Selatan	8.914	9.115	9.037	9.059	9.347
9	Bombana	8.190	8.344	8.234	8.310	8.680
10	Muna	8.098	8.253	8.203	8.218	8.328
11	Kolaka Timur	7.606	7.832	7.727	7.753	8.155
12	Buton Utara	7.393	7.534	7.470	7.496	7.935
13	Buton Tengah	7.160	7.264	7.221	7.244	7.670
14	Muna Barat	7.405	7.526	7.485	7.502	7.668
15	Buton	7.209	7.366	7.307	7.324	7.594
16	Buton Selatan	7.192	7.293	7.263	7.279	7.476
17	Konawe Kepulauan	6.601	6.832	6.700	6.738	7.192
	Sulawesi Tenggara	9.262	9.436	9.331	9.381	9.708

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PEMBANGUNAN MANUSIA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Konsep dan Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Penghitungan IPM oleh BPS sudah menggunakan metode baru yang direkomendasikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dengan melakukan beberapa penyesuaian. Metode agregasi IPM disempurnakan dari penggunaan metode rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Rumus

Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari tiga jenis indeks, yaitu :

1. Indeks Kesehatan ($I_{\text{Kesehatan}}$)

$$I_{\text{KESEHATAN}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

2. Indeks Pendidikan ($I_{\text{Pendidikan}}$)

Indeks Pendidikan terdiri dari dua indeks, yaitu :

- Indeks Rata-rata Lama Sekolah (I_{RLS})

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

- Indeks Harapan Lama Sekolah (I_{HLS})

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

PEMBANGUNAN MANUSIA

Selanjutnya Indeks Pendidikan dihitung menggunakan rumus berikut :

$$I_{PENDIDIKAN} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Indeks Pengeluaran (I_{PPP})

$$I_{PPP} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti pada tabel 6.5 berikut.

Tabel 6.5 Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen (1)	Satuan (2)	Minimum (3)	Maksimum (4)
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Sumber : BPS

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara, Papua.
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

PEMBANGUNAN MANUSIA

Kegunaan

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. Peningkatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode.
3. Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode pada suatu daerah/wilayah.
4. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
5. IPM dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah.

Interpretasi

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu :

- Nilai IPM kurang dari 60 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah rendah
- Nilai IPM antara 60 - 70 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah sedang
- Nilai IPM antara 70 - 80 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah tinggi
- Nilai IPM lebih dari 80 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah sangat tinggi.

Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Sumber Data

Proyeksi Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Indeks Harga Konsumen, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR dan Modul Konsumsi.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Utara.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Penyedia Informasi

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Keterbatasan

Variabel atau indikator yang digunakan terlalu sedikit, kualitas data komponen penyusun IPM untuk level kabupaten masih rendah, dan perkembangan kemajuan indikator sosial cenderung lambat.

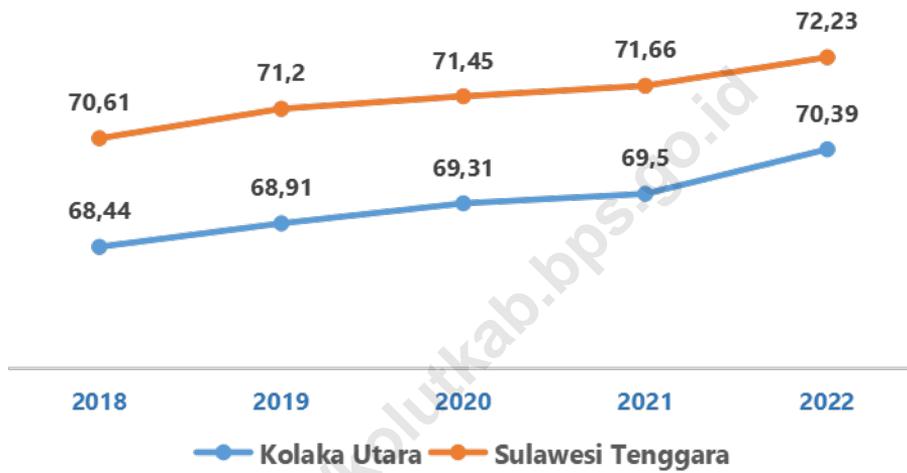
Tabel 6.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)
1	Kota Kendari	82,22	82,86	83,53	84,15	84,51
2	Kota Baubau	74,67	75,21	75,90	76,26	76,67
3	Kolaka	72,07	73,01	73,45	73,56	73,98
4	Konawe	70,72	71,29	71,35	71,48	72,04
5	Konawe Utara	68,50	69,22	69,86	70,23	71,10
6	Wakatobi	68,52	68,99	69,48	69,87	70,85
7	Kolaka Utara	68,44	68,91	69,31	69,50	70,39
8	Muna	68,47	68,97	69,02	69,17	69,61
9	Konawe Selatan	67,51	67,88	68,20	68,58	69,36
10	Buton Utara	67,13	67,68	67,87	68,08	69,00
11	Kolaka Timur	65,53	66,49	67,02	67,76	68,73
12	Buton	65,08	65,67	65,98	66,32	67,23
13	Bombana	65,04	65,65	66,05	66,25	66,81
14	Konawe Kepulauan	64,36	65,05	65,41	65,73	66,69
15	Muna Barat	64,11	64,45	65,08	65,48	66,21
16	Buton Selatan	63,47	64,37	64,93	64,99	65,44
17	Buton Tengah	63,46	64,06	64,37	64,55	65,29
	Sulawesi Tenggara	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PEMBANGUNAN MANUSIA

Grafik 6.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei dan Sensus

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 menempati urutan ke-7 dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada periode 2018-2022 IPM Kabupaten Kolaka Utara terus mengalami kenaikan sebesar 1,95 persen dari 68,44 pada tahun 2018 menjadi 70,39 tahun pada tahun 2022. Dengan capaian ini, IPM Kabupaten Kolaka Utara termasuk dalam kategori tinggi. Sementara IPM Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah mencapai status tinggi dengan nilai IPM 72,23 meningkat 1,62 persen dari tahun 2018.

PEMBANGUNAN MANUSIA

"halaman kosong"

<https://kolutkab.bps.go.id>

7

PENDAPATAN REGIONAL

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahun). PDRB terbagi menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) dan atas dasar harga konstan (riil). **PDRB atas dasar harga konstan** digunakan untuk mengetahui **pertumbuhan ekonomi** dari tahun ke tahun, sedangkan **PDRB atas dasar harga berlaku** digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah.



3 Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar PDRB | 2022



Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
39,44 %



Sektor Pertambangan dan Penggalian
17,81 %



Sektor Konstruksi
16,34 %

Pertumbuhan Ekonomi Kolaka Utara

3,85%
terhadap tahun 2021



Sumber: BPS, berbagai survei, sensus dan sumber lain

<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

PENDAPATAN REGIONAL

Pendahuluan

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, eks por barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

PENDAPATAN REGIONAL

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Konsep dan Definisi

PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Angka PDRB disajikan atas dasar harga berlaku (nominal) dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian atau kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Rumus

Terdapat tiga pendekatan untuk menghitung PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi atau Lapangan Usaha

Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara menguraikan biaya antara dari masing-masing total nilai produksi (output) tiap-tiap sektor atau subsektor, yang terbagi dalam 16 sektor.

$$\begin{aligned} \text{Output}_{b,t} &= \text{Produksi} \times \text{Harga}_t \\ \text{NTB}_{b,t} &= \text{Output}_{b,t} - \text{Biaya Antara}_{b,t} \end{aligned}$$

atau

$$\text{NTB}_{b,t} = \text{Output}_{b,t} \times \text{Rasio NTB}_0$$

Output_{b,t} : Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t

NTB_{b,t} : Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun t

Produksi_t : Kuantum produksi tahun ke-t

Harga_t : Harga produksi tahun ke-t

Rasio NTB : Perbandingan NTB terhadap output (NTB dibagi output)

Rasio NTB₀: Rasio NTB pada tahun dasar

PENDAPATAN REGIONAL

2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi.

$$PDRB = C + I + X + (E - M)$$

C : Konsumsi akhir rumah tangga

I : Investasi

X : Pengeluaran pemerintah

E : Ekspor

M : Impor

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB diperoleh dari hasil penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Rumusnya yaitu:

PDRB = sewa + upah + bunga + laba

Kegunaan

1. Indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah,
2. Bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa,
3. Bahan analisis produktivitas secara sektoral, dan
4. Alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Interpretasi

Misalnya pada tahun 2022 diketahui PDRB Kabupaten Kolaka Utara adalah sebesar 10.110 milyar rupiah, yang artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 adalah senilai 10.110 milyar rupiah atau sekitar 10,11 triliun rupiah.

Sumber Data

Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Dinas Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Dinas Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll.

PENDAPATAN REGIONAL

Level Penyajian

Provinsi, dan kabupaten/kota; disajikan tahunan.

Publikasi

PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Lapangan Usaha, PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Keterbatasan

- PDRB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu wilayah.
- PDRB hanya mengukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu wilayah dan bagaimana struktur serta perkembangannya antarwaktu.
- PDRB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDRB suatu wilayah tidak dapat menunjukkan apakah pendapatan regional tersebut terbagi secara merata diantara penduduknya.

Catatan

Di dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, BPS saat ini menggunakan tahun dasar 2010.

Tabel 7.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2018	7.955.539,21	5.967.484,80
2019	8.674.218,43	6.331.381,85
2020	8.835.243,98	6.360.262,49
2021*	9.188.014,05	6.530.504,08
2022**	10.110.989,96	6.781.751,39

Catatan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kolaka Utara 2018-2022

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.692.625,20	3.969.872,40	4.041.416,36	4.215.051,07	44.466.766,33
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	69.114,70	74.368,43	73.270,59	76.445,76	82.907,09
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	696.006,28	757.849,16	738.322,65	761.071,05	765.170,65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.043.407,31	3.359.469,58	3.429.564,96	3.716.775,48	3.956.337,74
Perubahan Inventori	7.540,53	8.800,28	8.903,44	13.355,16	18.423,70
Net Ekspor Barang dan Jasa	446.845,19	503.858,59	543.765,98	405.315,53	821.374,55
PDRB	7.955.539,21	8.674.218,43	8.835.243,98	9.188.014,05	10.110.989,96

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kolaka Utara 2018-2022

Jenis Pengeluaran (1)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.566.841,44	2.687.639,04	2.682.959,66	2.739.710,83	2.805.617,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	53.050,62	55.688,56	53.962,41	55.319,03	57.723,28
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	496.265,72	529.062,17	502.151,00	512.545,61	512.788,70
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.369.964,30	2.516.376,91	2.550.484,18	2.736.873,32	2.739.354,58
Perubahan Inventori	5.086,19	5.489,54	5.113,17	7.567,48	11.459,36
Net Ekspor Barang dan Jasa	476.276,54	537.125,63	565.592,07	478.487,81	654.807,87
PDRB	5.967.484,80	6.331.381,85	6.360.262,49	6.530.504,085	6.781.751,39

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2018-2022

Lapangan Usaha (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.314.775,9	3.557.649,7	3.587.387,4	3.637.127,3	3.987.413,7
B. Pertambangan dan Penggalian	1.369.614,9	1.534.756,7	1.552.738,7	1.547.596,1	1.800.297,3
C. Industri Pengolahan	79.567,9	85.062,2	84.916,1	87.034,7	97.313,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas	990,2	1.080,5	1.130,9	1.260,5	1.443,0
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.267,6	19.496,2	20.290,4	21.090,4	21.482,3
F. Konstruksi	1.208.526,8	1.339.569,2	1.407.151,9	1.576.281,3	1.652.576,9
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.010.035,9	1.126.215,0	1.128.709,2	1.204.308,4	1.364.097,7
H. Transportasi dan Pergudangan	117.100,8	123.171,0	123.086,0	129.555,3	140.943,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.932,0	38.868,2	39.088,8	41.664,0	43.894,6
J. Informasi dan Komunikasi	48.214,3	52.633,3	59.277,4	64.090,1	64.305,3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	61.830,8	66.476,3	70.023,7	78.726,7	90.596,3
L. Real Estat	95.545,9	100.304,1	102.434,8	104.884,4	112.647,0
M,N. Jasa Perusahaan	1.819,9	1.942,3	1.963,0	2.089,2	2.367,4
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	222.857,2	229.368,3	233.794,1	240.875,8	241.557,2
P. Jasa Pendidikan	180.553,6	196.914,1	212.753,9	228.519,3	252.269,2
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63.091,4	67.280,2	75.979,5	82.562,0	89.147,7
R, S, T, U Jasa Lainnya	124.814,0	133.431,2	134.518,4	140.348,7	148.636,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.955.539,2	8.674.218,4	8.835.244,0	9.188.014,0	10.110.990,0

Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.584.851,5	2.698.248,4	2.681.210,0	2.691.520,1	2.830.931,6
B. Pertambangan dan Penggalan	994.025,4	1.081.095,9	1.083.775,5	1.071.158,5	1.104.795,5
C. Industri Pengolahan	58.730,0	61.305,5	59.826,5	59.327,5	64.086,2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	892,6	955,7	977,5	1.067,4	1.173,8
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15.288,4	15.461,1	15.946,7	16.932,5	16.683,9
F. Konstruksi	821.410,8	885.255,6	920.584,8	1.012.519,6	1.000.474,4
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	743.357,6	807.417,7	795.244,7	839.932,9	896.418,3
H. Transportasi dan Pergudangan	102.028,7	106.642,2	104.452,5	108.247,2	110.738,8
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.325,2	28.333,3	28.116,1	29.808,2	30.965,7
J. Informasi dan Komunikasi	47.344,2	51.217,8	57.848,9	62.396,1	62.920,1
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	42.578,9	44.858,2	47.014,9	50.587,9	54.180,7
L. Real Estat	74.707,6	77.269,1	78.760,5	80.543,2	84.006,6
M,N. Jasa Perusahaan	1.395,7	1.433,9	1.420,3	1.488,4	1.610,3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	163.031,6	165.553,1	165.347,1	168.493,7	168.453,1
P. Jasa Pendidikan	139.994,1	148.595,9	158.714,6	167.557,3	177.426,3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.036,5	51.175,2	55.972,9	60.079,2	64.152,5
R, S, T, U Jasa Lainnya	101.486,1	106.563,5	105.049,0	108.844,4	112.733,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.967.484,8	6.331.381,8	6.360.262,5	6.530.504,1	6.781.751,4

Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB

Konsep dan Definisi

Distribusi persentase PDRB merupakan sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan yaitu lapangan usaha dalam PDRB sektoral atau penggunaan dalam PDRB pengeluaran terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase.

Rumus

$$\text{Distribusi PDRB} = \frac{PDRB_i}{\sum PDRB} \times 100\%$$

$PDRB_i$: Nilai PDRB sektoral atau komponen penggunaan ke-i atas dasar harga berlaku

Kegunaan

Menunjukkan peranan/sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap PDRB periode tertentu.

Interpretasi

Misalnya besarnya sumber pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 39,44 persen, yang artinya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 39,44 persen terhadap nilai PDRB Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022.

Sumber Data

Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Dinas Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Dinas Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll.

Level Penyajian

Provinsi, dan kabupaten/kota; disajikan tahunan.

Publikasi

PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Lapangan Usaha, PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Keterbatasan

Tidak bisa dibandingkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.6 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,67	41,01	40,60	39,59	39,44
B. Pertambangan dan Penggalian	17,22	17,69	17,57	16,84	17,81
C. Industri Pengolahan	1,00	0,98	0,96	0,95	0,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,24	0,22	0,23	0,23	0,21
F. Konstruksi	15,19	15,44	15,93	17,16	16,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,70	12,98	12,78	13,11	13,49
H. Transportasi dan Pergudangan	1,47	1,42	1,39	1,41	1,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,45	0,44	0,45	0,43
J. Informasi dan Komunikasi	0,61	0,61	0,67	0,70	0,64
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,78	0,77	0,79	0,86	0,90
L. Real Estat	1,20	1,16	1,16	1,14	1,11
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,80	2,64	2,65	2,62	2,39
P. Jasa Pendidikan	2,27	2,27	2,41	2,49	2,49
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,78	0,86	0,90	0,88
R, S, T, U Jasa Lainnya	1,57	1,54	1,52	1,53	1,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2018-2022

Jenis Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	46,49	46,42	45,77	45,76	45,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,87	0,87	0,86	0,83	0,83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,76	8,75	8,74	8,36	8,30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,87	38,26	38,61	38,83	40,55
Perubahan Inventori	1,11	0,09	0,10	0,10	0,15
Net Ekspor Barang dan Jasa	4,90	5,62	5,92	6,11	7,26
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

LAJU PERTUMBUHAN PDRB

Konsep dan Definisi

Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDRB. Penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga.

Rumus

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat dari suatu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100$$

PDRB_t : PDRB tahun ke-t

PDRB_{t-1} : PDRB tahun sebelumnya (t-1)

Kegunaan

1. Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional;
3. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Interpretasi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

PENDAPATAN REGIONAL

Sumber Data

Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Dinas Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Dinas Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll.

Level Penyajian

Provinsi, dan kabupaten/kota; disajikan tahunan.

Publikasi

PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Lapangan Usaha, PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

**Tabel 7.8 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022**

Tahun (1)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen) (2)
2018	6,59
2019	6,10
2020	0,46
2021*	2,68
2022**	3,85

Catatan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.9 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Persen) 2018-2022

Lapangan Usaha (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,50	4,39	-0,63	0,38	5,18
B. Pertambangan dan Penggalian	6,80	8,76	0,25	-1,16	3,14
C. Industri Pengolahan	0,72	4,39	-2,41	-0,83	8,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	7,07	2,28	9,19	9,97
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,95	1,13	3,14	6,18	-1,47
F. Konstruksi	6,56	7,77	3,99	9,99	-1,19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	8,62	-1,51	5,62	6,72
H. Transportasi dan Pergudangan	8,69	4,52	-2,05	3,63	2,30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	3,69	-0,77	6,02	3,88
J. Informasi dan Komunikasi	8,50	8,18	12,95	7,86	0,84
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,91	5,35	4,81	7,60	7,10
L. Real Estat	2,81	3,43	1,93	2,26	4,30
M,N. Jasa Perusahaan	5,82	2,74	-0,95	4,80	8,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,11	1,55	-0,12	1,90	-0,02
P. Jasa Pendidikan	5,40	6,14	6,81	5,57	5,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,03	4,36	9,38	7,34	6,78
R, S, T, U Jasa Jasa Lainnya Lainnya	5,59	5,00	-1,42	3,61	3,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,59	6,10	0,46	2,68	3,85

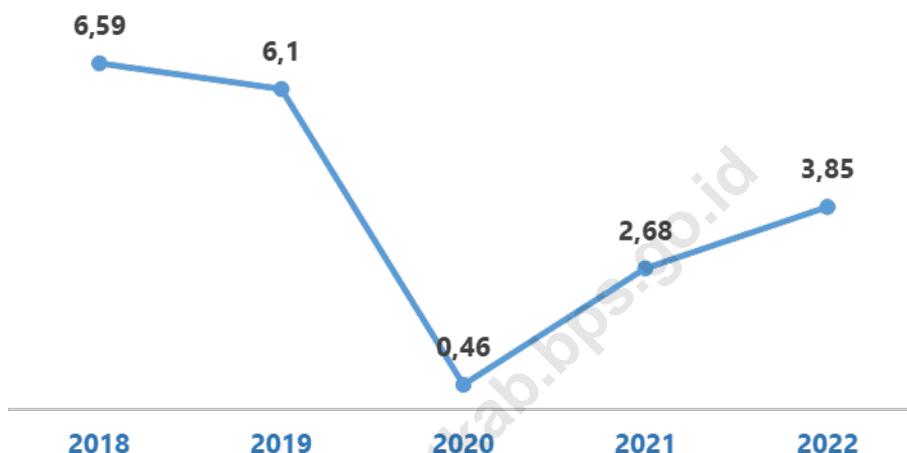
Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

Grafik 7.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022



Sumber : BPS

Selama periode tahun 2018-2022, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kolaka Utara cenderung mengalami penurunan. Terlebih saat pandemi Covid-19 mulai melanda pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kolaka Utara tercatat hanya sebesar 0,46 persen. Kemudian seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga tahun 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 3,85 persen. Dari tujuh belas sektor lapangan usaha, delapan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 9,97 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar -1,47 persen. Secara umum, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif.

Dari delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen, tiga teratas di antaranya: lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,97 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,19 persen; dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,02 persen. Sementara itu, dari sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari lima persen, tiga terbawah di antaranya: lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,02 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar -1,19 persen; dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar -1,47 persen.

PENDAPATAN REGIONAL

INDEKS IMPLISIT

Konsep dan Definisi

Indeks implisit merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*).

Rumus

$$\text{Indeks Implisit} = \frac{PDRB_{HB}}{PDRB_{HK}} \times 100\%$$

$PDRB_{HB}$: PDRB atas dasar harga berlaku

$PDRB_{HK}$: PDRB atas dasar harga konstan

Kegunaan

Digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi.

Interpretasi

Misalnya indeks implisit Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 mencapai 149,09 persen yang menunjukkan adanya kenaikan harga secara umum sebesar 49,09 persen dibandingkan tahun 2010.

Sumber Data

Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Dinas Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Dinas Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll.

Level Penyajian

Provinsi, dan kabupaten/kota; disajikan tahunan.

Publikasi

PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Lapangan Usaha, PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

PENDAPATAN REGIONAL

Penyedia Informasi

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Keterbatasan

Tidak bisa dibandingkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Tabel 7.10 Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Indeks Implisit PDRB (Persen)
(1)	(2)
2018	133,31
2019	137,00
2020	138,93
2021*	140,69
2022**	149,09

Catatan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

PDRB PER KAPITA

Konsep dan Definisi

Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Rumus

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB}{\Sigma \text{Penduduk}} \times 100\%$$

Σ Penduduk = Jumlah Penduduk

Kegunaan

1. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
2. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Interpretasi

Misalnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 sebesar 71,63 juta rupiah. Yang artinya pendapatan bruto tiap penduduk Kabupaten Kolaka Utara secara rata-rata telah mencapai 71,63 juta rupiah selama setahun pada tahun 2022.

Sumber Data

PDRB dan Proyeksi Penduduk hasil SUPAS/Sensus Penduduk.

Level Penyajian

Provinsi, dan kabupaten/kota; disajikan tahunan.

Publikasi

PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Lapangan Usaha, PDRB Kabupaten Kolaka Utara Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

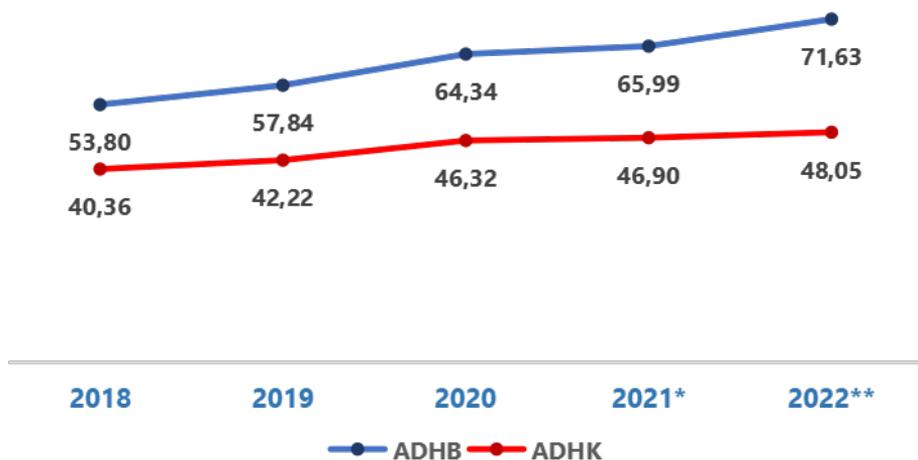
PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 7.11 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Juta Rupiah)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2018	53,80	40,36
2019	57,84	42,22
2020	64,34	46,32
2021*	65,99	46,90
2022**	71,63	48,05

Catatan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Semetara
Sumber : BPS, Survei dan Sensus

Grafik 7.2 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kolaka Utara, 2018-2022



Sumber : BPS, Survei dan Sensus

PENDAPATAN REGIONAL

INFLASI

Konsep dan Definisi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indikator untuk mengukur tingkat inflasi menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Rumus

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

$$NK_n = RH_n \times NK_n$$

$$\text{Inflasi}_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100$$

dengan:

Inflasi_n = Inflasi pada periode ke-n

IHK_n = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n

IHK_{n-1} = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n-1

RH_n = Relatif Harga (RH) pada periode ke-n

NK_n = Nilai Konsumsi (NK) pada periode ke-n-1

Kegunaan

- Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*Wage-Indexation*)
- Penyesuaian Nilai Kontrak (*Contractual Payment*)
- Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*)
- Penentuan target Inflasi (*Inflation Targeting*)
- Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Budget Indexation*)
- Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP Deflator*)
- Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*)
- Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

PENDAPATAN REGIONAL

Interpretasi

Rata-rata tertimbang dari perubahan harga semacam barang dan jasa, pada suatu selang waktu tertentu disebut inflasi apabila naik, dan deflasi apabila turun. Misalkan, indeks 110 berarti telah terjadi peningkatan 10 persen dalam harga sejak periode tahun dasar. Demikian pula halnya dengan angka indeks 90 berarti terjadi penurunan harga sebesar 10 persen dibandingkan dengan rata-rata harga pada tahun dasar.

Sumber Data

Survei Harga Konsumen.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi, disajikan bulanan.

Tabel 7.12 IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month (mtm)*, *Year to Date (ytd)*, dan *Year on Year (yoy)* Gabungan 2 Kota Desember 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi <i>mtm</i> Desember 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi <i>ytd</i> Desember 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi <i>yoy</i> Desember 2022 ³⁾ (%)	Andil Inflasi <i>mtm</i> Desember 2022 (%)	Andil Inflasi <i>yoy</i> Desember 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	107.87	115.85	0.75	7.39	7.39	0.75	7.39
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.66	117.16	1.28	4.93	4.93	0.40	1.58
Pakaian dan Alas Kaki	103.72	105.36	-0.34	1.58	1.58	-0.02	0.11
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.62	108.23	0.46	5.47	5.47	0.061	0.74
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106.84	112.73	0.17	5.51	5.51	0.01	0.29
Kesehatan	110.04	111.80	0.00	1.60	1.60	0.00	0.03
Transportasi	111.51	139.10	1.37	24.74	24.74	0.24	3.69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.84	97.71	0.00	-0.14	-0.14	0.00	-0.01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.67	106.15	0.19	2.39	2.39	0.00	0.05
Pendidikan	110.73	119.58	0.00	8.00	8.00	0.00	0.35
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	105.39	109.15	0.45	3.57	3.57	0.02	0.20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111.43	117.62	0.61	5.55	5.55	0.04	0.37

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Bulan Sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.

³⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.

Sumber: BPS

PENDAPATAN REGIONAL

<https://kolutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

8

KEMAHALAN KONSTRUKSI

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan **kota acuan**. IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur **tingkat kesulitan geografis** suatu daerah. Dengan kata lain, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK juga digunakan sebagai salah satu indikator dalam penghitungan **Dana Alokasi Umum** daerah.



IKK KOLAKA UTARA 2022



dengan kota acuan



90,81

nilai tersebut berarti tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Kolaka Utara **lebih rendah 9,19 persen** dibandingkan dengan Kota Makassar sebagai acuan rata-rata nasional

IKK Kolaka Utara 2022 menempati **peringkat ke-14** dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara



<https://solutkab.bps.go.id>

"halaman kosong"

KEMAHALAN KONSTRUKSI

Pendahuluan

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks yang menggambarkan perbandingan dengan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lainnya. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas suatu kabupaten/kota atau provinsi. IKK ini dapat menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu.

Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Data dihitung berdasarkan data harga triwulanan yang dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober tahun sebelumnya serta bulan Januari dan April pada tahun berjalan. Responden yang menjadi sumber data dalam kegiatan survei tersebut terdiri dari pedagang besar/distributor, pedagang eceran, kontraktor, dan Dinas Pekerjaan Umum. Diagram timbang penghitungan IKK menggunakan data *Bill of Quantity* (BoQ) dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Dengan kata lain, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Namun, adanya penggunaan realisasi APBD dalam pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota. IKK juga menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah perubahan metodologi dalam penghitungan IKK. Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator. Mulai tahun 2010, IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, di mana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Pada tahun 2015-2017, kota acuan IKK adalah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100 yaitu sama dengan rata-rata IKK 514 kabupaten/kota. Kemudian pada tahun 2018-2020 kota acuan IKK adalah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Lalu berganti kembali pada tahun 2021 hingga saat ini menggunakan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kota acuan baru.

KEMAHALAN KONSTRUKSI

Penghitungan IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dengan biaya yang murah (menggunakan *Bill of Quantity/BoQ*).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading* yang terdiri dari 3 kategori berikut:

1. Gedung dan bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.
2. Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
 - b. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - Bangunan jalan dan jembatan kereta.
 - Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

KEMAHALAN KONSTRUKSI

- c. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon / telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah, saluran drainase pada gedung.
 - Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 - Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 - Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
3. Bangunan lainnya yaitu antara lain bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

KEMAHALAN KONSTRUKSI

Rumus

Penghitungan IKK dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Dengan:

- NK_j : Nilai Komponen ke-j
- p_k : Harga material/upah/sewa alat ke-k
- q_k : Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k
- n : Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

Dengan:

- NK_j : Nilai Komponen ke-j
- C_i : Dummy kabupaten/kota ke-j
- P_j : Dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan
- α_i dan β_j : Koefisien regresi

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{sistem_i})^{w_{2i}}$$

Dengan:

- n : Jumlah sistem dalam bangunan
- w_{2i} : Penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi i
- PPP (*Purchasing Power Parity*)_{sistem i} : $\exp(\alpha_i)$

KEMAHALAN KONSTRUKSI

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{bangunan_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam bangunan

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa penimbang, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_i = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w1_i} \right) \cdot 100$$

Dengan:

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

Kegunaan IKK

1. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
2. IKK merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004.
3. IKK dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan kebijakan pemerintah daerah.

KEMAHALAN KONSTRUKSI

Interpretasi

Nilai IKK di atas 100 menunjukkan tingkat kemahalan bahan bangunan/konstruksi di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan harga bangunan/konstruksi di kota acuan yang menjadi rata-rata nasional, begitu pula sebaliknya. Misalnya nilai IKK Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 adalah sebesar 90,81. Hal ini berarti tingkat kemahalan bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Kolaka Utara lebih rendah 9,19% dibandingkan dengan harga bangunan/konstruksi di Kota Makassar sebagai kota acuan.

Sumber Data

Survei Harga Kemahalan Konstruksi, Data Realisasi APBD dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Data *Bill of Quantity* (BoQ) dari Dinas Pekerjaan Umum.

Level Penyajian

Provinsi, dan kabupaten/kota; disajikan tahunan.

Publikasi

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kolaka Utara.

Penyedia Informasi

Fungsi Statistik Distribusi.

Keterbatasan

IKK merupakan *spatial index*, hanya digunakan untuk membandingkan antar wilayah, namun bukan perbandingan antar waktu.

KEMAHALAN KONSTRUKSI

Tabel 8.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2022

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)
1	Buton Tengah	105,42	105,6	107,46	113,86	111,23
2	Buton Selatan	108,61	110,55	113,02	115,29	109,91
3	Buton Utara	109,09	110,32	108,82	104,98	107,23
4	Buton	105,06	104,05	106,17	106,92	106,52
5	Wakatobi	108,48	106,13	108,17	106,09	105,01
6	Kota Baubau	107,00	105,76	107,25	105,17	102,69
7	Bombana	98,43	96,55	96,63	97,40	98,10
8	Muna Barat	108,97	107,49	109,05	98,18	97,38
9	Muna	102,86	103,54	105,55	99,87	96,15
10	Konawe Utara	98,64	100,48	96,94	94,94	95,78
11	Konawe Kepulauan	107,09	104,97	101,54	96,41	94,31
12	Konawe Selatan	95,12	94,97	92,5	93,12	93,37
13	Kolaka	95,67	93,89	93,71	92,50	92,41
14	Kolaka Utara	103,97	99,33	97,79	94,64	90,81
15	Kolaka Timur	90,93	92,38	90,86	90,77	90,74
16	Konawe	97,92	100,1	97,10	93,92	89,87
17	Kota Kendari	93,03	91,45	90,91	90,06	89,23

Sumber : BPS

Nilai IKK Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 menempati urutan ke-14 se-Sulawesi Tenggara dengan besaran 90,81 yang berarti tingkat kemahalan bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2022 lebih rendah 9,19% dibandingkan dengan harga bangunan/konstruksi di Kota Makassar sebagai kota acuan.

KEMAHALAN KONSTRUKSI

"halaman kosong"

<https://kolutkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2023. *Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka 2023*. Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Utara Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Utara Menurut Pengeluaran 2018-2022*. Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2022. *Data Strategis Kabupaten Kolaka Utara 2021*. Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2022. *Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Kolaka Utara 2022*. Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Badan Pusat Statistik. 2023. Metadata Indikator diakses melalui <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2023. Tabel Dinamis diakses melalui <https://kolutkab.bps.go.id/subject>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2023. Tabel Dinamis diakses melalui <https://sultra.bps.go.id/subject>.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kolutkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Jalan Protokol Poros DPRD Lasusua 93911, Telp. (0406) 2330029
Website : <https://kolutkab.bps.go.id> E-mail : bps7408@bps.go.id